



Legenda

- Tutupan Hutan 2017
■ Deforestasi 2013-2017



LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2025

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 ini telah disusun berdasarkan pengukuran kinerja atas pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

Laporan ini merupakan wujud pertanggungjawaban serta komitmen Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel.

Bula, Maret 2026

Bupati Seram Bagian Timur,



FACHRI HUSNI ALKATIRI, Lc., M.Si



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan perwujudan kewajiban konstitusional dan moral Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam melaporkan capaian kinerja atas mandat yang telah diberikan oleh rakyat. Tahun 2025 merupakan momentum krusial sebagai tahun pertama implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2025-2029, di mana fondasi pembangunan yang kokoh mulai diletakkan demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.

Melalui penerapan nilai-nilai **CINTA** (*Consistent, Innovative, Trustworthy, Transparent, Accountable*), Penyusunan LAKIP Tahun 2025 ini menggambarkan pencapaian kinerja fisik maupun keuangan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur. Di tengah berbagai tantangan, pemerintah daerah berhasil merealisasikan Anggaran Pendapatan sebesar **Rp 761,72 Miliar (81,10%)** dan mengoptimalkan penyerapan Anggaran Belanja sebesar **Rp 796,62 Miliar (84,68%)**. Capaian ini merupakan wujud nyata komitmen seluruh jajaran perangkat daerah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Keberhasilan menurunkan angka prevalensi stunting, penguatan IPM, serta pengelolaan risiko bencana yang semakin baik merupakan bukti nyata dari sinergi seluruh pemangku kepentingan.

Kami menyadari bahwa masih terdapat tantangan dan keterbatasan dalam pencapaian target di beberapa sektor. Oleh karena itu, LAKIP ini tidak hanya disusun sebagai potret keberhasilan, tetapi juga sebagai instrumen evaluasi yang jujur untuk melakukan perbaikan berkelanjutan di tahun-tahun mendatang.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh jajaran Perangkat Daerah, DPRD, serta seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur atas



dukungan dan kerja kerasnya. Semoga laporan ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi dan referensi dalam memajukan Bumi Ita Wotu Nusa yang kita cintai.

Bula, Maret 2026

Bupati Seram Bagian Timur,



FACHRI HUSNI ALKATIRI, Lc., M.Si



RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR TAHUN 2025

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 merupakan potret capaian kinerja pada tahun pertama periode RPJMD 2025-2029. Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan berjalan dengan sangat baik yang ditandai dengan tercapainya 14 Indikator Kinerja Utama (IKU) di atas 100%.

Capaian Kinerja Keuangan: Dari sisi keuangan, Pendapatan Daerah terealisasi sebesar **Rp 761.722.533.683 (81,10%)**, di mana **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** menunjukkan performa luar biasa dengan capaian **103,99%** dari target. Sementara itu, Belanja Daerah terealisasi sebesar **Rp 796.623.853.383 (84,68%)**, dengan fokus utama pada **Belanja Modal** yang terserap hingga **95,16%** guna mendukung percepatan infrastruktur wilayah.

Capaian Kinerja Strategis: Beberapa keberhasilan strategis yang berhasil dicapai antara lain:

1. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai angka 71,10.
2. Keberhasilan signifikan dalam menekan Prevalensi Stunting hingga 1,90% (melampaui target 2,10%).
3. Peningkatan kualitas tata kelola dengan nilai SAKIP 51,06 dan Indeks Reformasi Birokrasi 30,05.
4. Penurunan Indeks Risiko Bencana menjadi 125,19, yang memperkuat resiliensi daerah terhadap potensi bencana.

Meskipun seluruh target IKU tercapai, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tetap berkomitmen untuk melakukan upaya lebih lanjut pada tahun 2026, khususnya dalam digitalisasi pelayanan publik dan optimalisasi konektivitas antar wilayah guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.



Bula, Maret 2026

Bupati Seram Bagian Timur,



FACHRI HUSNI ALKATIRI, Lc., M.Si



DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Landasan Hukum	2
C. Maksud dan Tujuan	3
D. Gambaran Singkat Kabupaten Seram Bagian Timur	4
E. Permasalahan	32
F. Isu Strategis	44
G. Sistematika Penyusunan	45
BAB II PERENCANAAN KINERJA	46
A. Visi dan Misi	40
B. Tujuan dan Sasaran	43
C. Strategi dan Arah Kebijakan	52
D. Indikator Kinerja Utama	54
E. Perjanjian Kinerja	58
F. Rencana Anggaran Tahunan 2025	65
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	67
A. Metode Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2023	67
B. Capaian Indikator Kinerja Utama	69
C. Analisa Capaian Kinerja Tahun 2023	75
D. Permasalahan dan Solusi	107
E. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah	109
BAB IV PENUTUP	113
A. Simpulan	113
B. Upaya Lebih Lanjut	114

LAMPIRAN

1. Rencana Strategis Tahun 2025-2029



2. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2025	Page 1 of 2
3. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	Page 1 of 2
4. Realisasi Program Pendukung Sasaran Tahun 2024	Page 1 of 11



BAB I

PENDAHULUAN

PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Perencanaan Strategis Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah yang di implementasikan kedalam visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah. Program dan kegiatan yang yang direncanakan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan

Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran dan evaluasi kinerja serta pelaporan kinerja. Empat hal tersebut merupakan fase penting yang membentuk siklus akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan tahapan terakhir dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Selain berperan sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku “stake holder”, LAKIP juga merupakan sarana untuk memperbaiki organisasi pada periode berikutnya.

Sebagai instrumen pertanggungjawaban kepada masyarakat, dalam lingkup internal birokrasi, fungsi ini diterjemahkan melalui serangkaian tindakan korektif yang konsisten dan kontinyu sebagai upaya perbaikan strategi yang dianggap paling tepat untuk diterapkan saat ini sesuai dengan perubahan lingkungan yang terjadi.

Inti dari pertanggungjawaban kinerja adalah perbandingan antara target yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dengan realisasi capaian kinerja pada akhir tahun anggaran. Hal ini menuntut adanya aktivitas pengelolaan data kinerja secara terus-menerus selama periode kegiatan berlangsung. Sedangkan pengukuran kinerja dilakukan secara konsisten terhadap indikator yang telah disepakati dalam rencana kinerja.



Untuk menjamin dan mempertahankan kelangsungan obyektivitas hasil pengukuran kinerja tersebut, integrasi antara keahlian sumber daya manusia, peralatan dan teknologi sangat diperlukan. Manfaatnya, dalam jangka pendek strategi ini berkontribusi dalam peningkatan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil. Dalam jangka menengah, keberhasilan strategi ini terlihat dari adanya peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program. Sedangkan dalam jangka panjang, strategi ini akan menempatkan Kabupaten Seram Bagian Timur tetap eksis dan unggul dalam persaingan antar kabupaten/kota di era otonomi daerah.

A. Latar Belakang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan satu kesatuan yang terdiri dari perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran, dan evaluasi kinerja yang membentuk siklus akuntabilitas terpadu. Sebagai bagian dari siklus tersebut, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 disusun untuk menggambarkan pencapaian visi, misi, dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah.

Penyusunan laporan ini bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen pertanggungjawaban kepada masyarakat selaku pemangku kepentingan (stakeholder). Melalui LAKIP, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melakukan evaluasi secara jujur terhadap keselarasan antara target rencana kinerja tahunan dengan realisasi capaian di lapangan. Hasil evaluasi ini kemudian diterjemahkan ke dalam tindakan korektif yang konsisten demi perbaikan tata kelola organisasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan.

B. Landasan Hukum

Landasan hukum sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2016 adalah:

1. Undang-Undang Nomor : 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;



3. Undang-Undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. SK Kepala LAN Nomor : 239/IX/6/8/2003, tanggal 25 Maret 2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Seram Bagian Timur 2025-2029.

C. Maksud Dan Tujuan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja organisasi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ingin dicapai.



Tujuan penyusunan LAKIP Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebagai sarana bagi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholders (Presiden, DPRD dan Masyarakat) atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur. Penyusunan LAKIP juga merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja (performance improvement) di masa yang akan datang.

D. Gambaran Singkat Kabupaten Seram Bagian Timur

1. Yuridis

Kabupaten Seram Bagian Timur merupakan kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Maluku Tengah yang dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2003, tanggal 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Seram Bagian Barat dan Kepulauan Aru.

2. Letak Geografis

Letak geografis Kabupaten Seram Bagian Timur dengan merujuk kepada wilayah administrasi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003, Kabupaten Seram Bagian Timur dibatasi oleh :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Seram
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Arafura
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Banda
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Maluku Tengah

Luas wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur seluruhnya 20.656,894 Km² terdiri dari wilayah daratan 5.779,123 Km² dan luas wilayah lautan adalah 14.877,771 Km² yang terbagi atas dua gugus pulau besar yaitu:

1. Gugus Pulau I dengan luas wilayah 15.093,52 Km² terdiri dari luas daratan 3.773,38 Km² dan lautan 11.320,14 Km², terdiri atas empat pulau, yakni :
 - Pulau Seram Bagian Timur (Kecamatan Seram Timur, Bula, dan Werinama)
 - Pulau Geser
 - Pulau Gorom



– Manuwoko

2. Gugus Pulau II dengan luas wilayah 794,4 Km² terdiri dari luas daratan 119,16 Km² dan lautan 675,24 Km², yaitu Pulau Kesui.

Deretan pulau-pulau yang tersebar di wilayah Seram Bagian Timur berjumlah 62 pulau diantara sebanyak 27 pulau dihuni sedangkan sisanya sebanyak 35 pulau tidak dihuni.

3. Administratif

Wilayah Administratif Kabupaten Seram Bagian Timur terdiri dari lima belas Kecamatan dan jumlah desa 198 (seratus sembilan puluh delapan) desa, yaitu :

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Jumlah Desa	
1	Bula	Bula	10	desa
2	Seram Timur	Geser	16	desa
3	Pulau Gorom	Kataloka	24	desa
4	Werinama	Werinama	10	desa
5	Tutuk Tolu	Air Kasar	11	desa
6	Wakate	Tamher Timur	18	desa
7	Kilmury	Kilmury	13	desa
8	Siwalalat	Atiahu	12	desa
9	Teor	Wermaf Kampung Baru	10	desa
10	Pulau Panjang	Pulau panjang	7	desa
11	Bula Barat	Waiketam Baru	13	desa
12	Gorom Timur	Miran	23	desa
13	Kian Darat	Kian Darat	10	desa
14	Siritaun Wida Timur	Siritaun Wida Timur	10	desa
15	Teluk Waru	Waru	11	desa
Jumlah			198	desa

Sumber data : Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Angka 2025

Luas wilayah Daratan dari masing-masing Kecamatan dilingkungan Kabupaten Seram Bagian Timur, adalah sebagai berikut :

No	Kecamatan	Luas Daratan (Km ²)	Prosentase (%)
1	Bula	643,36	11,13
2	Bula Barat	880,29	15,23



LAKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

No	Kecamatan	Luas Daratan (Km ²)	Prosentase (%)
3	Tutuk Tolu	330,09	5,71
4	Seram Timur	73,35	1,27
5	Kilmury	837,62	14,49
6	Pulau Gorom	91,303	1,58
7	Pulau Panjang	20,53	0,36
8	Gorom Timur	29,29	0,51
9	Wakate	37,58	0,65
10	Teor	23,41	0,41
11	Werinama	993,84	17,20
12	Siwalalat	847,19	14,66
13	Teluk Waru	669,67	11,59
14	Siritaun Wida Timur	172,37	2,98
15	Kian Darat	129,23	2,24
Jumlah		5.779,123	100

Sumber data : Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Angka 2025



4. Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur sampai dengan Tahun 2025 seluruhnya berjumlah **142.234** jiwa, terdiri dari :

- Laki – laki	:	71.788	Jiwa
- Perempuan	:	70.446	Jiwa
Jumlah		142.234	Jiwa

Sumber data: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Data Tahun 2025 Data Semester I

Tingkat penyebaran penduduk per kecamatan di Kabupaten Seram Bagian Timur, adalah sebagai berikut :

KODE_WILAYAH	KECAMATAN	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
81.05.01	Bula	13.849	13.837	27.686
81.05.02	Seram Timur	3.778	3.755	7.533
81.05.03	Werinama	2.952	2.916	5.868
81.05.04	Pulau Gorom	11.088	10.885	21.973
81.05.05	Wakate	4.712	4.559	9.271
81.05.06	Tutuk Tolu	3.671	3.509	7.180
81.05.07	Siwalalat	3.503	3.413	6.916
81.05.08	Kilmury	3.448	3.364	6.812
81.05.09	Pulau Panjang	1.339	1.367	2.706
81.05.10	Teor	1.667	1.633	3.300
81.05.11	Gorom Timur	4.846	4.817	9.663
81.05.12	Bula Barat	4.524	4.197	8.721
81.05.13	Kian Darat	3.286	3.281	6.567
81.05.14	Siritaun Wida Timur	3.595	3.628	7.223
81.05.15	Teluk Waru	3.039	2.902	5.941
81.05.16	Ukar Sengan	2.491	2.383	4.874
8105	Kab. Seram Bagian Timur	71.788	70.446	142.234

Sumber data: *Data Konsolidasi Bersih (DKB) Semester I Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil*



5. Pendidikan.

Jumlah murid Kabupaten Seram Bagian Timur berdasarkan tingkat pendidikan Tahun 2025/2026 adalah:

Kecamatan	Tingkat/Jenjang Pendidikan						Aliyah
	SD	Ibtidayah	SLTP	MTSn	SLTA	SMK	
Pulau Gorom	2.392	172	1.117	234	666	121	249
Wakate	1.131	113	387	37	268	64	46
Seram Timur	1.490	51	411	186	328	110	215
Tutuk Tolu	549	436	193	173	245	-	104
Werinama	622	-	217	34	128	36	-
Bula	3.044	363	972	512	873	499	239
Kilmury	924	107	323	106	205	-	-
Siwalalat	717	71	365	-	260	-	-
Teor	468	-	140	-	98	-	-
Gorom Timur	1.080	64	294	140	398	-	-
Bula Barat	844	-	212	99	202	-	-
Pulau Panjang	344	-	123	-	103	-	-
Kian Darat	697	206	254	161	290	-	-
Siritaun Wida Timur	730	176	347	77	40	168	-
Teluk Waru	834	-	240	-	-	-	-
Ukar Sengan	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	15.866	1.758	5.595	1.779	4.215	1.107	1045

Sumber data : Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Angka 2026

6. Kesehatan

Jumlah sarana kesehatan masyarakat yang berada di Kabupaten Seram Bagian Timur, berupa 2 unit Rumah Sakit yaitu: RSUD Bula berlokasi di kecamatan Bula dan RSUD Goran Riun yang berlokasi di kecamatan Pulau Gorom, 22 unit Puskesmas, 71 unit Puskesmas Pembantu, 4 Unit Klinik, 12 Unit Polindes, 255 Unit Posyandu yang tersebar di 15 kecamatan di Kabupaten



LAKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

Seram Bagian Timur.

Tabel Jumlah Fasilitas Kesehatan dan Jenisnya di Kabupaten Seram Bagian Timur

No	Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Puskesmas Pembantu	Klinik/balai kesehatan	Polindes	Posyandu
1	Bula	1	1	3	4	1	17
2	Seram Timur	-	1	2	-	2	16
3	P. Gorom	1	3	11	-	-	38
4	Werinama	-	2	5	-	-	16
5	Tutuk Tolu	-	1	4	-	-	14
6	Wakate	-	1	9	-	-	21
7	Kilmury	-	2	5	-	-	19
8	Siwalalat	-	2	3	-	1	14
9	Teor	-	1	5	-	-	10
10	Pulau Panjang	-	1	2	-	-	6
11	Bula Barat	-	2	6	-	4	13
12	Gorom Timur	-	1	4	-	-	24
13	Kian Darat	-	1	3	-	-	10
14	Siritaun Wida Timur	-	1	3	-	2	13
15	Teluk Waru	-	1	4	-	2	14
16	Ukar Sengan	-	1	2	-	-	10
Jumlah		2	22	71	4	12	255

Sumber data : Data Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur

Jumlah tenaga kesehatan sebanyak 2.248 orang, yaitu 9 Tenaga Dokter Spesialis, 42 Tenaga Dokter Umum, 10 Tenaga Dokter Gigi, 897 Tenaga Keperawatan, 484 Tenaga Kebidanan, 84 Tenaga Nutrisi, 66 Tenaga Sanitarian, 46 Tenaga Apoteker, 89 Tenaga Kefarmasian, 45 Tenaga Kesmas, 32 Tenaga Atlm, dan 112 tenaga lainnya. Baik tenaga medis maupun para medis di Kabupaten Seram Bagian Timur menurut status fungsional dengan pola sebaran pada masing-masing kecamatan sampai dengan Tahun 2025 sebagai berikut :



LAKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

NO	Unit Kerja	Dokter Spesialis			Dokter Umum			Dokter Gigi		
		PNS	PPPK	Non ASN	PNS	PPPK	Non ASN	PNS	PPPK	Non ASN
1	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	RSUD Bula	9	-	3	6	3	-	1	-	-
3	RSUD Goran Riun	-	-	1	1	1	3	-	-	1
4	Puskesmas Afang	-	-	-	-	-	1	-	-	-
5	Puskesmas Air Kasar	-	-	-	-	-	1	-	-	-
6	Puskesmas Amarsekaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Puskesmas Atiahu	-	-	-	1	-	-	-	-	-
8	Puskesmas Batuasa	-	-	-	1	-	-	-	-	1
9	Puskesmas Bula	-	-	-	3	1	-	1	-	-
10	Puskesmas Dai	-	-	-	-	-	1	-	-	1
11	Puskesmas Geser	-	-	-	1	-	-	1	-	-
12	Puskesmas Jakarta Baru	-	-	-	-	-	1	-	-	-
13	Puskesmas Kataloka	-	-	-	2	-	-	-	-	1
14	Puskesmas Kilga	-	-	-	-	1	-	-	-	-
15	Puskesmas Kilmury	-	-	-	-	-	1	-	-	-
16	Puskesmas Miran	-	-	-	1	-	1	-	-	-
17	Puskesmas Nama	-	-	-	1	-	-	-	-	-
18	Puskesmas Polin	-	-	-	1	-	1	-	-	-
19	Puskesmas Pulau Panjang	-	-	-	-	-	1	-	-	1
20	Puskesmas Tamher Timur	-	-	-	-	-	1	-	-	1
21	Puskesmas Teor	-	-	-	-	-	1	-	-	1
22	Puskesmas Trans R Banggoi	-	-	-	1	-	-	-	-	-
23	Puskesmas Ukarsengan	-	-	-	-	-	1	-	-	-
24	Puskesmas Waru	-	-	-	1	-	-	-	-	-
25	Puskesmas Werinama	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Total PNS		9	-	-	22	-	-	3	-	-
Total PPPK		-	0	-	-	6	-	-	0	-
total Non ASN		-	-	4	-	-	14	-	-	7
Total Keseluruhan		13			42			10		



LAKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

NO	Unit Kerja	Perawat			Bidan			Nutrisisionis		
		PNS	PPPK	Non ASN	PNS	PPPK	Non ASN	PNS	PPPK	Non ASN
1	Dinas Kesehatan							3	2	
2	RSUD Bula	61	95	24	17	47	14	7	3	
3	RSUD Goran Riun	17	53	46	2	28	16	1	1	5
4	Puskesmas Afang	2	20	6	2	14	1		3	
5	Puskesmas Air Kasar	9	9	16	7	8	6	2	1	4
6	Puskesmas Amarsekaru	3	15	12	3	5	6		3	
7	Puskesmas Atiahu	8	11	8	5	7	1	1	2	1
8	Puskesmas Batuasa	3	11	2	4	7	1		1	1
9	Puskesmas Bula	34	1	13	14	3	10	3		1
10	Puskesmas Dai	4	11	15	3	8	5	1	1	3
11	Puskesmas Geser	9	10	7	8	3	7	1		
12	Puskesmas Jakarta Baru	9	12	25	6	11	7		2	
13	Puskesmas Kataloka	8	11	5	6	11	3	1	1	
14	Puskesmas Kilga	8	7	11	2	9	6	1	1	1
15	Puskesmas Kilmury	5	10	4	1	11	4		3	
16	Puskesmas Miran	4	15	7	5	9	2	2	1	
17	Puskesmas Nama	4	18	7	5	5	10		2	1
18	Puskesmas Polin	8	11	8	1	8	5		1	2
19	Puskesmas Pulau Panjang	4	11	4	2	5				2
20	Puskesmas Tamher Timur	14	11	13	5	6	7	1		1
21	Puskesmas Teor	5	9	4	2	9			2	1
22	Puskesmas Trans R Banggoi	14	5	3	7	5	1	2		
23	Puskesmas Ukarsengan	2	7	8	4	6	5		1	1
24	Puskesmas Waru	10	9	7	5	7	4	1	1	1
25	Puskesmas Werinama	8	9	8	6	8	1	3		
Total PNS		253			122			30		
Total PPPK			381			240			32	
total Non ASN				263			122			25
Total Keseluruhan		897			484			87		



LAKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

NO	Unit Kerja	Sanitarian			Apoteker			Farmasi		
		Non ASN	PNS	PPPK	Non ASN	PNS	PPPK	Non ASN	PNS	PPPK
1	Dinas Kesehatan		4	3	2	4	6	1	4	6
2	RSUD Bula		2	4	2	8	5	6	8	5
3	RSUD Goran Riun	5	2	1	2	1				
4	Puskesmas Afang		2	1						
5	Puskesmas Air Kasar	4	2				1			
6	Puskesmas Amarsekaru			1	1					
7	Puskesmas Atiahu	1	1		2					
8	Puskesmas Batuasa	1		2						
9	Puskesmas Bula	1	2			3				
10	Puskesmas Dai	3	1		1					1
11	Puskesmas Geser		1				1			1
12	Puskesmas Jakarta Baru			2			1			
13	Puskesmas Kataloka		1	1						
14	Puskesmas Kilga	1	1		2	1				
15	Puskesmas Kilmury		2				1	1		
16	Puskesmas Miran				1					
17	Puskesmas Nama	1		2	1		1	1		
18	Puskesmas Polin	2	1		1					1
19	Puskesmas Pulau Panjang	2	2	1						
20	Puskesmas Tamher Timur	1	1							
21	Puskesmas Teor	1		1	1			1	0	
22	Puskesmas Trans R Banggoi		1				1	1		
23	Puskesmas Ukarsengan	1	1							
24	Puskesmas Waru	1			2	1				
25	Puskesmas Werinama			2						
Total PNS			27			18			12	
Total PPPK				21			17			14
total Non ASN		25			18			11		
Total Keseluruhan		66			46			89		



NO	Unit Kerja	Kemas			Atlm			Nakes Lainnya		
		PNS	PPPK	Non ASN	PNS	PPPK	Non ASN	PNS	PPPK	Non ASN
1	Dinas Kesehatan	25	7	5				27	4	11
2	RSUD Bula	6	7	4	4	11	6	16	4	32
3	RSUD Goran Riun	3	4	4	3	4	8	1	1	1
4	Puskesmas Afang	1	2		1					
5	Puskesmas Air Kasar	1	1	2		1	1			
6	Puskesmas Amarsekaru	1	2	1	1					
7	Puskesmas Atiahu	1	2	1		2				
8	Puskesmas Batuasa	1	1	1		1	1		1	
9	Puskesmas Bula	3		1	2	1	1	1		1
10	Puskesmas Dai	1	3	1		2	3			
11	Puskesmas Geser	3	1	2	1		1		1	4
12	Puskesmas Jakarta Baru	1	1	5		2				1
13	Puskesmas Kataloka	1	2	2		1	2			
14	Puskesmas Kilga		1	2			2			
15	Puskesmas Kilmury	1		1	2					
16	Puskesmas Miran			3	1					
17	Puskesmas Nama		1	1		1		1		
18	Puskesmas Polin	1					1			1
19	Puskesmas Pulau Panjang	1		1			2			
20	Puskesmas Tamher Timur	1	1	2		2				0
21	Puskesmas Teor		1			1	1			
22	Puskesmas Trans R Banggoi	2	2		1					
23	Puskesmas Ukarsengan	1		2		2	1			1
24	Puskesmas Waru		3	1	2					
25	Puskesmas Werinama	2	7	3	1	3	2	1	2	
Total PNS		57			19			47		
Total PPPK			49			34			13	
total Non ASN				45			32			52



LAKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

NO	Unit Kerja	Kemas			Atlm			Nakes Lainnya		
		PNS	PPPK	Non ASN	PNS	PPPK	Non ASN	PNS	PPPK	Non ASN
Total Keseluruhan		151			85			112		

NO	Unit Kerja	Nakes Lainnya			Umum			Total Per Unit Kerja
		PNS	PPPK	Non ASN	PNS	PPPK	Non ASN	
1	Dinas Kesehatan	27	4	11	5	3	2	125
2	RSUD Bula	16	4	32	3	2	75	506
3	RSUD Goran Riun	1	1	1	1	1	58	280
4	Puskesmas Afang						2	61
5	Puskesmas Air Kasar						1	74
6	Puskesmas Amarsekaru							57
7	Puskesmas Atiahu				1	1		59
8	Puskesmas Batuasa		1				1	42
9	Puskesmas Bula	1		1				102
10	Puskesmas Dai						1	68
11	Puskesmas Geser		1	4	1			69
12	Puskesmas Jakarta Baru			1			4	95
13	Puskesmas Kataloka							60
14	Puskesmas Kilga							58
15	Puskesmas Kilmury							47
16	Puskesmas Miran						1	56
17	Puskesmas Nama	1						62
18	Puskesmas Polin			1				53
19	Puskesmas Pulau Panjang							37
20	Puskesmas Tamher Timur			0				69
21	Puskesmas Teor							40
22	Puskesmas Trans R Banggoi							50
23	Puskesmas Ukarsengan			1			2	47
24	Puskesmas Waru							59
25	Puskesmas Werinama	1	2			1		72



Total PNS	47			11			630
Total PPPK		13			8		815
total Non ASN			52			147	803
Total Keseluruhan	112			166			2248

Sumber data : Data Dinas Kesehatan Kab. Seram Bagian Timur

7. Pertanian

Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki potensi besar di sektor pertanian dan peternakan. Produksi padi sawah terkonsentrasi di Kecamatan Bula Barat dengan luas panen 718,5 Ha dan produksi 2.874 ton. Komoditas perkebunan unggulan adalah kelapa dengan total produksi 14.472 ton, tersebar di hampir seluruh kecamatan. Sektor peternakan didominasi oleh sapi dengan jumlah 213.405 ekor, terbesar di Kecamatan Bula Barat. Data ini menunjukkan bahwa sektor pertanian dan peternakan merupakan tulang punggung ekonomi daerah.

Luas lahan pertanian di Kabupaten Seram Bagian Timur seluruhnya seluas 203.041,50 Ha dengan rincian peruntukan dan pengelolaannya dapat digambarkan sebagai berikut:

- Tanaman Pangan dan Hortikultura seluas 130.994,5 Ha (64,52%), yang baru dikelola seluas 3.032 Ha (0,02%) dengan jenis komoditas padi, palawija, jagung, kacang tanah, sayur dan buah-buahan.
- Perkebunan Seluas 346.931 Ha (6,0 %) yang baru dikelola seluas 39.076 Ha (11,26%) dengan jenis komoditi kelapa, cengkih, pala, coklat dan kopi.
- Peternakan seluas 72.047 Ha (35,48%) yang baru dikelola 20 Ha (0,03 %) dengan jenis komoditi Rumput Hijauan Makan Ternak jenis Rumput Gaja, Rumput Lapangan areal ternak sapi, kambing serta unggas.

Berikut jumlah produksi tanaman pertanian dan perkebunan menurut jenisnya di Kabupaten Seram Bagian Timur adalah:



LAKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

Kecamatan/ Komoditi	Luas Areal Panen (Ha)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
Kecamatan Bula			
Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	-	-	-
- Padi Ladang	-	-	-
- Jagung	34	40	136
- Ubi Kayu	10	130	130
- Ubi Jalar	3	110	33
- Kacang Tanah	6	14	8
- Kacang Hijau	-	-	-
- Kacang Kedele	15	16	24
Tanaman Perkebunan:			
- Kelapa	1242	400	479
- Cengkih	33	92	90
- Pala	308	140	6
- Coklat	78	853	33
- Kopi	22	49	1
- Jambu Mete	9	500	4
Kecamatan Seram Timur			
- Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	-	-	-
- Padi Ladang	-	-	-
- Jagung	2	20	4
- Ubi Kayu	3	45	135
- Ubi Jalar	6	30	180
- Kacang Tanah	5	13	78
- Kacang Hijau	-	-	-
- Kacang Kedele	-	-	-
Tanaman Perkebunan:			
- Kelapa	612	400	245
- Cengkih	352	200	70
- Pala	66	150	10
- Kakao	8	165	1
- Kopi	4	50	1
- Jambu Mete	1	400	4
- Sagu	658	570	37
Kecamatan P. Gorom			
Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	-	-	-
- Padi Ladang	-	-	-



LAKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

Kecamatan/ Komoditi	Luas Areal Panen (Ha)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
- Jagung	-	-	-
- Ubi Kayu	7 Ha	45	315
- Ubi Jalar	6 Ha	30	180
- Kacang Tanah	7 Ha	15	105
- Kacang Hijau	-	-	-
- Kacang Kedele	9 Ha	13	117
Tanaman Perkebunan:			
- Kelapa	1.018	470	479
- Cengkih	446	202	90
- Pala	394	150	6
- Kakao	2	165	33
- Kopi	2	50	1
- Jambu Mete	1	400	4
- Kelapa Sawit	-	-	-
- Sagu	35	570	19.980
Kecamatan Werinama			
- Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	-	-	-
- Padi Ladang	-	-	-
- Jagung	-	-	-
- Ubi Kayu	5	45	225
- Ubi Jalar	8	30	240
- Kacang Tanah	7	13	91
- Kacang Hijau	-	-	-
- Kacang Kedele	-	-	-
Tanaman Perkebunan:			
- Kelapa	1.714	400	686
- Cengkih	399	200	80
- Pala	126	150	19
- Kakao	68	165	11
- Kopi	7	50	4
- Jambu Mete	1	400	4
- Sagu	1.098	570	63
Kecamatan Tutuk Tolu			
- Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	-	-	-
- Padi Ladang	-	-	-
- Jagung	6	40	24
- Ubi Kayu	3	45	135



Kecamatan/ Komoditi	Luas Areal Panen (Ha)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
- Ubi Jalar	4	30	120
- Kacang Tanah	5	13	65
- Kacang Hijau	-	-	-
- Kacang Kedele	-	-	-
Tanaman Perkebunan:			
- Kelapa	571	400	229
- Cengkih	508	200	102
- Pala	75	150	11
- Kakao	6	165	1
- Kopi	6	50	1
- Jambu Mete	1	400	4
- Sagu	2.674	570	152
Kecamatan Wakate			
- Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	-	-	-
- Padi Ladang	-	-	-
- Jagung	-	-	-
- Ubi Kayu	2	45	90
- Ubi Jalar	5	30	150
- Kacang Tanah	4	13	52
- Kacang Hijau	-	-	-
- Kacang Kedele	-	-	-
Tanaman Perkebunan:			
- Kelapa	906	420	479
- Cengkih	216	200	90
- Pala	191	150	6
- Kakao	2	165	33
- Kopi	2	50	1
- Jambu Mete	1	400	4
- Kelapa Sawit	-	-	-
- Sagu	59	570	19.980
Kecamatan Kilmury			
- Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	-	-	-
- Padi Ladang	-	-	-
- Jagung	-	-	-
- Ubi Kayu	4	45	180
- Ubi Jalar	6	30	180
- Kacang Tanah	7	13	91



LAKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

Kecamatan/ Komoditi	Luas Areal Panen (Ha)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
- Kacang Hijau	-	-	-
- Kacang Kedele	-	-	-
Tanaman Perkebunan:			
- Kelapa	1.070	400	428
- Cengkih	576	200	115
- Pala	69	150	10
- Kakao	85	165	14
- Kopi	12	50	6
- Jambu Mete	1	400	4
- Sagu	2.980	570	170
Kecamatan Siwalalat			
Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	-	-	-
- Padi Ladang	-	-	-
- Jagung	-	-	-
- Ubi Kayu	8	45	360
- Ubi Jalar	10	30	300
- Kacang Tanah	3	13	39
- Kacang Hijau	-	-	-
- Kacang Kedele	-	-	-
Tanaman Perkebunan:			
- Kelapa	1.474	400	590
- Cengkih	427	200	85
- Pala	53	150	8
- Kakao	40	165	7
- Kopi	5	50	3
- Jambu Mete	1	400	4
- Sagu	501	570	29
Kecamatan Bula Barat			
Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	718,5	40	2.874
- Padi Ladang	245	20	486
- Jagung	175	40	700
- Ubi Kayu	331,5	100	3.315
- Ubi Jalar	8	30	240
- Kacang Tanah	8	13	104
- Kacang Hijau	-	-	-
- Kacang Kedele	-	-	-



LAKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

Kecamatan/ Komoditi	Luas Areal Panen (Ha)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
Tanaman Perkebunan:			
- Kelapa	1.313	365	479
- Cengkih	67	134	90
- Pala	49	122	6
- Kakao	73	453	33
- Kopi	2	50	1
- Jambu Mete	1	400	4
- Kelapa Sawit	222	166	37
- Sagu	3.699	540	19.980
Kecamatan Pulau Panjang			
Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	-	-	-
- Padi Ladang	-	-	-
- Jagung	-	-	-
- Ubi Kayu	5	45	225
- Ubi Jalar	4	30	120
- Kacang Tanah	6	13	78
- Kacang Hijau	-	-	-
- Kacang Kedele	-	-	-
Tanaman Perkebunan:	-		
- Kelapa	984	400	394
- Cengkih	6	200	1
- Pala	2	150	-
- Kakao	1	165	-
- Kopi	1	50	-
- Jambu Mete	1	400	-
- Sagu	2	570	1
Kecamatan Gorom Timur			
Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	-	-	-
- Padi Ladang	-	-	-
- Jagung	-	-	-
- Ubi Kayu	7	45	315
- Ubi Jalar	6	30	180
- Kacang Tanah	6	13	78
- Kacang Hijau	-	-	-
- Kacang Kedele	-	-	-
Tanaman Perkebunan:			



LAKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

Kecamatan/ Komoditi	Luas Areal Panen (Ha)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
- Kelapa	526	400	210
- Cengkih	328	200	66
- Pala	196	150	29
- Kakao	1	165	1
- Kopi	2	50	1
- Jambu Mete	1	400	4
- Sagu	28	570	16
Kecamatan Teor			
Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	-	-	-
- Padi Ladang	-	-	-
- Jagung	-	-	-
- Ubi Kayu	6	45	270
- Ubi Jalar	7	30	210
- Kacang Tanah	8	13	104
- Kacang Hijau	-	-	-
- Kacang Kedele	-	-	-
Tanaman Perkebunan:			
- Kelapa	1.221	400	479
- Cengkih	103	200	90
- Pala	57	150	6
- Kakao	1	165	33
- Kopi	1	50	1
- Jambu Mete	1	400	4
- Kelapa Sawit	-	-	-
- Sagu	5	570	19.980
Kecamatan Kian Darat			
Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	-	-	-
- Padi Ladang	-	-	-
- Jagung	-	-	-
- Ubi Kayu	4	45	180
- Ubi Jalar	5	30	150
- Kacang Tanah	4	13	52
- Kacang Hijau	-	-	-
- Kacang Kedele	-	-	-
Tanaman Perkebunan:			
- Kelapa	399	400	160
- Cengkih	287	200	57



LAKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

Kecamatan/ Komoditi	Luas Areal Panen (Ha)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
- Pala	107	150	16
- Kakao	9	165	1
- Kopi	3	50	2
- Jambu Mete	1	400	4
- Sagu	569	570	32
Kecamatan Teluk Waru			
Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	-	-	-
- Padi Ladang	-	-	-
- Jagung	-	-	-
- Ubi Kayu	3	45	135
- Ubi Jalar	5	30	150
- Kacang Tanah	7	13	91
- Kacang Hijau	-	-	-
- Kacang Kedele	-	-	-
Tanaman Perkebunan:			
- Kelapa	1.115	400	446
- Cengkih	140	200	28
- Pala	55	150	8
- Kakao	20	165	3
- Kopi	4	50	2
- Jambu Mete	1	400	4
- Kelapa Sawit	8	166	1
- Sagu	7.190	570	409
Kecamatan Siritaun Wida Timur			
Tanaman Pangan:			
- Padi Sawah	-	-	-
- Padi Ladang	-	-	-
- Jagung	-	-	-
- Ubi Kayu	5	45	225
- Ubi Jalar	6	30	180
- Kacang Tanah	3	13	39
- Kacang Hijau	-	-	-
- Kacang Kedele	-	-	-
Tanaman Perkebunan:			
- Kelapa	305	400	122
- Cengkih	246	200	49
- Pala	64	150	10
- Kakao	6	165	1



LAKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

Kecamatan/ Komoditi	Luas Areal Panen (Ha)	Rata-Rata Produksi (Kw/Ha)	Produksi (Ton)
- Kopi	7	50	4
- Jambu Mete	1	400	4
- Sagu	533	570	30

Sumber data : Dinas Pertanian tahun 2025

Dari tabel diatas menunjukkan produksi tanaman pangan yang memiliki produksi paling besar adalah padi sawah diikuti ubi kayu dan jalar, tanaman perkebunan yang memiliki produksi paling besar adalah pala diikuti cengkih, kelapa, coklat, dan kopi.

Berikut jumlah populasi peternakan menurut jenisnya di Kabupaten Seram Bagian Timur:

No	Kecamatan	Kuda	Kerbau	Sapi	Kambing	Unggas (Ayam & Itik)
1	Bula	-	-	37.122	1.365	1.693 (Ayam 593 + Itik 1.100)
2	Seram Timur	-	-	451	4.635	4.048 (Ayam Ras 3.740 + Ayam Kampung 308)
3	Pulau Gorom	-	-	255	3.243	340 (Ayam Kampung)
4	Werinama	-	-	1.766	2.438	413 (Ayam Kampung)
5	Tutuk Tolu	-	-	7.154	1.195	362 (Ayam Kampung)
6	Kesui Watubela	-	-	0	663	296 (Ayam Kampung)
7	Kilmury	-	-	4.802	3.248	307 (Ayam Kampung)
8	Siwalalat	-	-	14.994	2.190	413 (Ayam Kampung)



No	Kecamatan	Kuda	Kerbau	Sapi	Kambing	Unggas (Ayam & Itik)
9	Teor	-	-	0	898	370 (Ayam Kampung)
10	Pulau Panjang	-	-	0	613	76 (Ayam Kampung)
11	Bula Barat	-	-	113.484	613	1.436 (Ayam Kampung 386 + Itik 1.050)
12	Gorom Timur	-	-	0	1.855	364 (Ayam Kampung)
13	Kian Darat	-	-	745	1.330	83 (Ayam Kampung)
14	Siritaun Wida Timur	-	-	1.274	863	74 (Ayam Kampung)
15	Teluk Waru	-	-	15.464	690	391 (Ayam Kampung)
16	Ukarsengan	-	-	0	0	0
Jumlah		-	-	197.511	25.839	10.666

Sumber data : Dinas Pertanian tahun 2025

Untuk usaha peternakan adalah ternak potong yang keluar dari Kabupaten Seram Bagian Timur dan umumnya usaha peternakan ini masih bersifat tradisional. Populasi ternak terbesar adalah unggas diikuti kambing dan sapi.

8. Perikanan

Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang cukup besar. Luas perairan laut mencapai **11.935,84 Km²** dengan garis pantai sepanjang **627,58 Km²**. Wilayah kelola laut terdiri atas:

- Perairan 0–4 mil laut: **5.947,98 Km²**
- Perairan 4–12 mil laut: **11.189,82 Km²**
- Kawasan potensi budidaya: **82,75 Km²**



Produksi Perikanan Tahun 2025

Jumlah produksi perikanan dan kelautan Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2025 tercatat sebesar **23.530,29 ton**, dengan rincian:

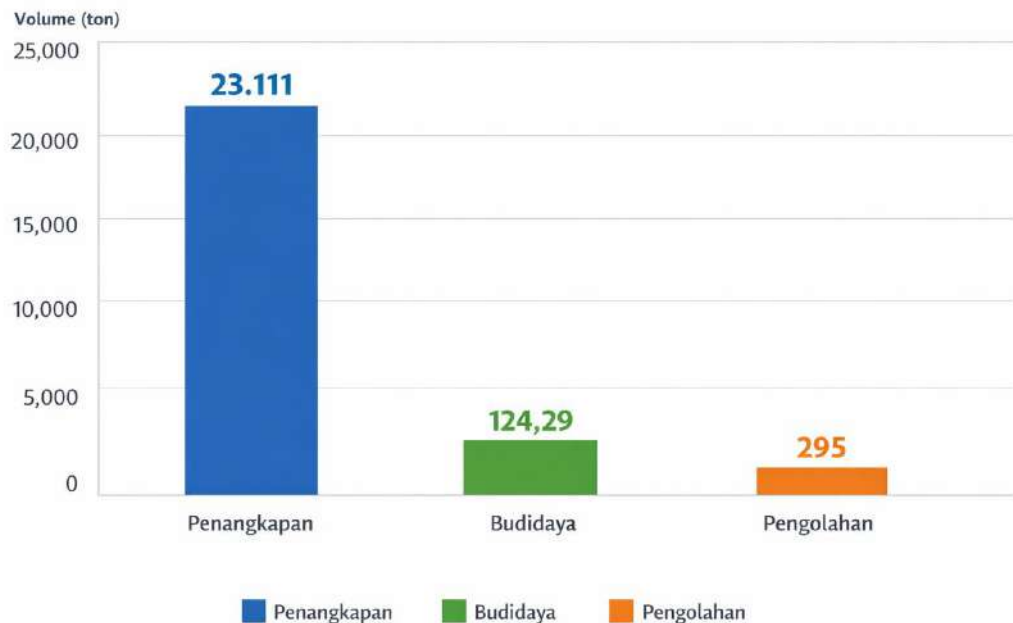
- Produksi penangkapan: **23.111 ton**
- Produksi budidaya: **124,29 ton**
- Produksi hasil pengolahan ikan: **295 ton**

Konsumsi Ikan

Tingkat konsumsi ikan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2025 mencapai **75 kg/kapita/tahun**, atau **132,79%** dari standar nasional (56,48 kg/kapita/tahun). Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi ikan masyarakat daerah ini relatif tinggi dibandingkan rata-rata nasional, sekaligus mencerminkan ketersediaan sumber daya perikanan yang memadai.

**Tabel Produksi Perikanan
Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025**

Jenis Produksi	Volume (ton)
Penangkapan	23.111
Budidaya	124,29
Pengolahan hasil perikanan	295
Total Produksi	23.530,29

Produksi Perikanan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025*Volume Produksi (dalam ton)***9. Pertambangan**

Berikut data produksi Bahan Galian C di Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2016:

Kabupaten Seram Bagian Timur memiliki potensi pertambangan yang meliputi pertambangan umum, bahan galian C, air bawah tanah, air permukaan, dan minyak bumi. Potensi ini tersebar di beberapa wilayah dan menjadi salah satu sumber daya alam yang dapat dikembangkan secara berkelanjutan.

Produksi Bahan Galian C

Berdasarkan data Profil Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2019, produksi bahan galian C selama tahun 2016 tercatat sebesar 186.487 m³, dengan rincian sebagai berikut:

No	Jenis Bahan Galian	Produksi (m ³)
1	Batu Kali	26.571
2	Batu Pecah	23.373
3	Batu Karang	13.708



No	Jenis Bahan Galian	Produksi (m ³)
4	Pasir Pasang	26.382
5	Pasir Urug	2.674
6	Sirtu	68.166
7	Kerikil	4.752
8	Tanah Urug	20.161
Jumlah		186.487

“data pertambangan terbaru belum dipublikasikan, sehingga digunakan data historis sebagai gambaran potensi daerah.”

Sumber data : Profil Daerah Seram Bagian Timur 2019



10. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Seram Bagian Timur atas dasar harga berlaku pada tahun 2025 mencapai Rp3.773,40 miliar, mengalami pertumbuhan sebesar 2,44% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar Rp3.683,51 miliar.



LAKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2023–2025

NO.	LAPANGAN USAHA	2023	2024	2025
1.	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	1.097,09	1.187,95	1.311,92
2.	Pertambangan dan Penggalian	684,12	618,82	468,50
3.	Industri Pengolahan	59,70	62,74	68,12
4.	Pengadaan listrik dan Gas	0,54	0,58	0,61
5.	Pengaduan Air, pengelolaan Sampah	2,31	2,42	2,53
6.	Konstruksi	270,50	292,27	314,61
7.	Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda Motor	297,50	328,49	360,42
8.	Transportasi dan Pergudangan	120,57	128,01	139,12
9.	Penyediaan akomodasi dan Makan Minum	18,78	21	24,74
10.	Informasi dan Komunikasi	23,49	24,83	26,01
11.	Jasa Keuangan	66,90	71,43	75,06
12.	Real Estate	11,90	12,59	13,54
13.	Jasa Perusahaan	4,85	5,27	5,46
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	609,61	661,71	681,78
15.	Jasa Pendidikan	85,07	91,9	95,07
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	101,86	113,72	122,70
17.	Jasa Lainnya	54,50	59,79	63,23
TOTAL PDRB		3.638,14	3.683,51	3.773,40

Sumber data : BPS Kabupaten Seram Bagian Timur 2026



Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Seram Bagian Timur atas dasar harga konstan tahun 2010 pada tahun 2025 mencapai **Rp2.280,48 miliar**, mengalami pertumbuhan sebesar **3,49%** dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar **Rp2.203,64 miliar**.

PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (miliar rupiah), 2023–2025

No.	SEKTOR	2023	2024	2025
1.	Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	643,52	677,19	734,36
2.	Pertambangan dan Penggalian	489,77	466,72	442,11
3.	Industri Pengolahan	32,80	33,79	36,11
4.	Pengadaan listrik, Gas	0,38	0,39	0,40
5.	Pengadan Air, pengelolaan Sampah	1,85	1,90	1,93
6.	Konstruksi	144,43	151,53	158,75
7.	Perdagangan besar dan eceran, Reparasi mobil dan sepeda Motor	173,75	188,80	203,11



LAKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

No.	SEKTOR	2023	2024	2025
8.	Transportasi dan Pergudangan	63,01	66,71	72,22
9.	Penyediaan akomodasi dan Makan Minum	10,76	11,60	13,07
10.	Informasi dan Komunikasi	18,49	19,29	20,27
11.	Jasa Keuangan dan Asuransi	37,01	39,19	40,48
12.	Real Estate	8,18	8,55	9,01
13.	Jasa Perusahaan	3,61	3,76	3,84
14.	Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial Wajib	346,13	369,72	376,36
15.	Jasa Pendidikan	60,06	63,51	64,56
16.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61,60	66,77	68,44
17.	Jasa Lainnya	32,13	34,21	35,47
Total PDRB		2.127,49	2.203,64	2.280,48

Sumber data : BPS Kabupaten Seram Bagian Timur 2026

PDRB Kabupaten Seram Bagian Timur 2023–2025

Nilai Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Miliar Rupiah)



Sumber: BPS Kabupaten Seram Bagian Timur



11. Organisasi

Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur sampai dengan Tahun 2025 terdiri dari :

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat;
- d. Dinas, terdiri atas :
 1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Satuan Polisi Pamong Praja;
 4. Dinas Sosial;
 5. Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;
 6. Dinas Ketahanan Pangan;
 7. Dinas Pertanian;
 8. Dinas Lingkungan Hidup;
 9. Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Komunikasi Dan Informatika;
 11. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 12. Dinas Pariwisata;
 13. Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan;
 14. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
 15. Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
 16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
 17. Dinas Perhubungan;
 18. Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan;
 19. Dinas Perikanan;
 20. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 21. Dinas Pemadam Kebakaran.
- e. Badan, terdiri atas:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Litbang;



2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
3. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Badan Pendapatan Daerah;
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
6. Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
- f. Kecamatan, terdiri atas:
 1. Kecamatan Bula;
 2. Kecamatan Bula Barat;
 3. Kecamatan Tutuk Tolu;
 4. Kecamatan Seram Timur;
 5. Kecamatan Kilmury;
 6. Kecamatan Pulau Gorom;
 7. Kecamatan Pulau Panjang;
 8. Kecamatan Gorom Timur;
 9. Kecamatan Wakate;
 10. Kecamatan Teor;
 11. Kecamatan Werinama;
 12. Kecamatan Siwalalat;
 13. Kecamatan Teluk Waru;
 14. Kecamatan Siritaun Wida Timur;
 15. Kecamatan Kian Darat.
 16. Kecamatan Ukar Sengan
- g. Pemerintahan Desa sebanyak 198 des.

E. Permasalahan

Permasalahan yang terjadi merupakan cerminan dari masih adanya kesenjangan antara kondisi eksisting dengan kondisi ideal yang ingin dicapai sesuai dengan visi dan misi kepala daerah.

Permasalahan tersebut muncul baik dalam aspek pembangunan manusia, ekonomi, sosial budaya, infrastruktur, pelayanan publik, maupun tata kelola pemerintahan. Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan iklim, geografi wilayah



kepulauan, serta dinamika global dan nasional juga turut memengaruhi arah kebijakan pembangunan daerah.

1. Permasalahan Pada Aspek Geografi dan Demografi

Dari aspek geografis dan demografis, teridentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Degradasi fungsi daerah aliran sungai (DAS)
- b. Meningkatnya risiko banjir dan longsor
- c. Pengelolaan kawasan konservasi belum optimal
- d. Adanya kesenjangan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah
- e. Ketersediaan air bersih belum merata
- f. Sistem irigasi pertanian belum memadai
- g. Nilai ekonomi sektor kelautan/perikanan belum maksimal
- h. Pariwisata belum dikembangkan sebagai sektor strategis
- i. Kerentanan terhadap perubahan iklim

2. Permasalahan Pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Dari aspek kesejahteraan masyarakat, teridentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- a. Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi
- b. Persentase prevelensi stunting sebesar 35% dengan kategori **“awas”**
- c. Infrastruktur dan mutu layanan pendidikan belum merata
- d. Akses dan pemanfaatan layanan kesehatan belum inklusif
- e. Tingkat pengangguran belum terserap secara optimal
- f. Numerasi siswa masih pada kategori **“Kurang”** di semua jenjang
- g. Keterampilan digital dan akses teknologi belum merata
- h. Menurunnya Kualitas keluarga
- i. Ketimpangan gender belum terselesaikan secara menyeluruh
- j. Erosi budaya dan bahasa lokal
- k. Literasi digital masyarakat masih rendah
- l. Minimnya pemanfaatan teknologi dalam UMKM

3. Permasalahan Pada Aspek Daya Saing

- a. Kinerja sektor industri pengolahan belum maksimal
- b. Rendahnya nilai ekspor komoditas unggulan
- c. Investasi sektor produktif belum optimal
- d. Kapasitas inovasi daerah tergolong rendah (Indeks Inovasi Daerah 2024: **61,01**, kategori *kurang inovatif*)
- e. Ekonomi kreatif belum berkembang signifikan
- f. Produktivitas tenaga kerja masih rendah
- g. Jumlah desa tertinggal masih tinggi (> 37%)
- h. Ketahanan ekonomi lokal antarwilayah timpang
- i. Akses hunian layak masih terbatas
- j. Daya saing lingkungan belum kuat (Pilar lingkungan Indeks Ekonomi Hijau stagnan di **64–65**)
- k. Pengelolaan ekonomi biru belum maksimal
- l. Ketimpangan kualitas infrastruktur antarwilayah
- m. Literasi dan pemanfaatan TIK belum merata
- n. SPBE belum merata antar perangkat daerah

4. Permasalahan Pada Aspek Pelayanan Umum**A. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar****A1. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga**

- a. Keterbatasan dan Ketidakmerataan Sumber Daya Pendidik
- b. Infrastruktur dan Sarana Prasarana yang Tidak Memadai
- c. Rendahnya Mutu dan Standar Layanan Pendidikan
- d. Tata Kelola dan Sistem Manajemen Pendidikan yang Lemah
- e. Keterbatasan Pembinaan dan Pengembangan Kepemudaan
- f. Pelestarian dan Pengembangan Budaya yang Belum Maksimal
- g. Pembinaan Olahraga yang Belum Sistematis
- h. Integrasi dan Penyelarasan Program Lintas Bidang yang Lemah



- i. Sarana atraksi seni dan budaya relatif kurang baik secara kualitas maupun kuantitas
- j. Belum optimalnya pelestarian cagar budaya
- k. Pencapaian SPM belum 100%
- l. Belum meratanya sarana prasarana pendidikan dasar
- m. Mutu Pendidikan Belum Optimal
- n. Penguatan Pendidikan Karakter belum optimal
- o. Tata Kelola Pendidikan belum memadai
- p. Tenaga pendidik dan kependidikan belum memiliki kompetensi sesuai standar
- q. Belum meratanya penempatan tenaga pendidik dan kependidikan

A2. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan

- a. Kesenjangan Ketersediaan dan Kualitas SDM Kesehatan
- b. Tingginya angka kematian ibu dan anak dan stunting
- c. Belum tercapainya SPM Kesehatan dan masih banyaknya fasilitas kesehatan yang belum terakreditasi menunjukkan adanya kesenjangan dalam standar pelayanan
- d. Peningkatan Beban Penyakit Ganda (Double Burden of Disease)
- e. Adanya Kesenjangan Infrastruktur dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- f. Rendahnya Kesadaran Masyarakat dalam Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat
- g. Penanganan HIV/AIDS yang Belum Optimal
- h. Pelayanan Kesehatan bagi Kelompok Rentan (Balita dan Lansia) belum optimal
- i. Angka kesakitan akibat penyakit berbasis lingkungan masih cukup tinggi (TBC, Diare, DBD, Pneumonia, COVID 19 dll)
- j. Angka Kejadian Penyakit Tidak Menular cukup tinggi

A3. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Ketidakselarasan Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
- b. Kerentanan Terhadap Bencana Banjir dan Permasalahan Drainase
- c. Defisiensi Infrastruktur Dasar dan Layanan Publik



- d. Lemahnya Sistem Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Ruang
- e. Keterbatasan Sistem Informasi dan Teknologi Penataan Ruang
- f. Belum semua jalan kewenangan Kabupaten dalam kondisi mantap
- g. Belum semua jaringan irigasi yang ada dalam kondisi baik
- h. Belum semua penduduk memiliki akses air minum dan sanitasi (limbah domestik)
- i. Masih kurangnya ketaatan terhadap IMB/PBG

A4. Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

- a. Tingginya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
- b. Belum Terintegrasinya Penanganan Kawasan Kumuh
- c. Keterbatasan Akses Infrastruktur Dasar (Air Bersih, Sanitasi, Drainase)
- d. Masih Terbatasnya Akses Hunian bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)
- e. Masih adanya kawasan kumuh yang belum ditangani
- f. Belum Tersedianya Database Infrastruktur dan Perumahan yang Komprehensif
- g. Masih Belum Jelasnya Status Hukum Aset Tanah (Sertifikasi, Batas Wilayah)

A5. Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

- a. Ancaman Konflik Sosial Masih Berpotensi Terjadi
- b. Penegakan Peraturan Daerah Belum Optimal
- c. Distribusi Informasi Rawan Bencana Belum Merata
- d. Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana Belum Menjangkau Semua Wilayah
- e. Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Belum Merata

A6. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial

- a. Masih Terbatasnya Sarana dan Prasarana Rehabilitasi dan Pelayanan Sosial



- b. Belum Optimalnya Pemberdayaan Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)
- c. Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sosial Belum Optimal
- d. Data Fakir Miskin Belum Terupdate Secara Komprehensif
- e. Belum Optimalnya Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Kalangan Perusahaan

B. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

B1. Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja dan transmigrasi

- a. Belum Tercukupinya Tenaga Kerja Terampil dan Berkualitas
- b. Masih Tingginya Tingkat Pengangguran Terbuka
- c. Rendahnya Kompetensi Pencari Kerja
- d. Ketidaksesuaian Kualifikasi Tenaga Kerja dengan Kebutuhan Dunia Usaha
- e. Penempatan Kerja Masih Belum Optimal

B2. Urusan Perlindungan Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa

- a. Kurangnya Optimalisasi Peran Jejaring Penanganan Anak dan Perempuan
- b. Pemberdayaan Perempuan di Sektor Ekonomi Belum Maksimal
- c. Rendahnya Partisipasi Perempuan dalam Ruang Publik dan Pengambilan Keputusan
- d. Tingginya Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak termasuk TPPO
- e. Implementasi Kabupaten Layak Anak Belum Optimal
- f. Lemahnya Kualitas dan Kuantitas Kelembagaan Perlindungan Perempuan dan Anak
- g. Belum optimalnya pencapaian Indeks Desa
- h. Masih ditemukannya desa dengan status desa tertinggal
- i. Belum optimalnya Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) dan Lembaga Ekonomi Masyarakat (LEM)



- j. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan desa

B3. Urusan Pemerintahan Bidang Ketahanan Pangan

- a. Ketahanan Pangan Masyarakat Belum Optimal
- b. Belum Optimalnya Pemanfaatan Pangan Lokal
- c. Masih Lemahnya Penerapan Pola Pangan Harapan (PPH)
- d. Masih Ditemukan Desa Rawan Pangan
- e. Tingginya Ketergantungan terhadap Beras
- f. Belum Optimalnya Ketersediaan dan Fasilitas Pengembangan Pangan Pokok di Masyarakat

B4. Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup

- a. Meningkatnya Risiko Bencana dan Alih Fungsi Lahan di Kawasan Rawan
- b. Ketersediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Belum Optimal
- c. Pengelolaan Sampah Belum Mengadopsi Teknologi Efektif
- d. Rendahnya Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Kebersihan Lingkungan
- e. Belum Terbangunnya Sistem Manajemen Pengelolaan Lingkungan Terpadu
- f. Belum Meratanya Layanan Pengelolaan Sampah
- g. Kualitas Lingkungan Hidup Masih Rendah (Indeks IKLH)
- h. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan RTH Belum Optimal

B5. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Ketidaksesuaian Domisili dengan Data Kependudukan
- b. Akses Terbatas terhadap Layanan Digital Admindak
- c. Kurangnya Pengawasan Terhadap SOP Pelayanan Admindak
- d. Kualitas dan Kuantitas SDM serta Sarpras Masih Terbatas
- e. Belum Seluruh Penduduk Memiliki KTP Elektronik
- f. Masih Banyak Anak Belum Memiliki Akta Kelahiran



- g. Rendahnya Kesadaran Masyarakat akan Kepemilikan Dokumen Kependudukan

B6. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Tingginya Laju Pertumbuhan Penduduk
- b. Tingginya Total Fertility Rate (TFR)

B7. Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan

- a. Rendahnya akses masyarakat terhadap pelayanan angkutan umum
- b. Belum terkonsepnya pelayanan sarana prasarana dan perlengkapan jalan baik dari ketersediaan dan fungsinya
- c. Belum terbangunnya beberapa terminal tipe C

B8. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Persandian

- a. Ketersediaan Data Statistik Sektorial Belum Optimal
- b. Minimnya Kesadaran Pentingnya Data bagi Perangkat Daerah
- c. Belum Optimalnya Implementasi Kebijakan Satu Data Daerah
- d. Kurangnya Validasi dan Akurasi Data Digital
- e. Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Belum Merata
- f. Diseminasi dan Distribusi Informasi Belum Terstruktur
- g. Penanganan Persandian Masih Lemah

B9. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan

- a. Belum berkembangnya ekosistem kewirausahaan dan regenerasi pelaku usaha baru.
- b. Lemahnya promosi, branding, dan akses pasar produk lokal.
- c. Kurangnya inovasi dan teknologi dalam pengembangan UMKM dan IKM.



- d. Belum tersusunnya kebijakan induk industri daerah (RPIK) sebagai amanat UU.
- e. Kondisi fisik pasar tradisional yang tidak layak pakai dan tidak menarik.
- f. Rendahnya literasi manajerial dan akses pendanaan UMKM/IKM

B10. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Masih kurangnya optimalisasi pengolahan data investasi serta data potensi investasi Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai dorongan atau penunjang investasi daerah
- b. Masih perlunya peningkatan sistim pelayanan investasi yang berbasis TIK yang terintegrasi secara nasional

B11. Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan

- a. Masih kurang optimalnya kapasitas perpustakaan sekolah maupun perpustakaan lembaga lainnya guna mendorong minat baca masyarakat
- b. Masih belum optimalnya pengelolaan perpustakaan digital, guna mendorong minat baca masyarakat, dalam rangka penyesuaian terhadap kondisi new normal
- c. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas sumber daya pengelola kearsipan guna mewujudkan tertib system tata kearsipan

C. Urusan Pemerintahan Pilihan

C1. Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata

- a. Rendahnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah dengan stakeholder utama pariwisata.
- b. Belum tersedianya amenities dan infrastruktur dasar yang layak di lokasi-lokasi wisata unggulan.
- c. Lemahnya branding dan promosi destinasi wisata, baik secara lokal maupun digital.



- d. Tata kelola pariwisata belum berbasis sistem manajemen destinasi yang profesional dan partisipatif.
- e. Sektor ekonomi kreatif belum terintegrasi sebagai penguat produk dan pengalaman wisata.
- f. Belum ada strategi terpadu untuk meningkatkan nilai tambah dari sektor wisata ke masyarakat sekitar

C2. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian

- a. Alih Fungsi Lahan yang Tidak Terdata dan Terpantau
- b. Kualitas Komoditas, SDM, dan Sarpras Masih Rendah
- c. Minimnya Penggunaan Benih/Bibit Unggul Bersertifikat
- d. Kemitraan Kelembagaan Petani Masih Lemah
- e. Pemanfaatan Sarpras Produksi Belum Maksimal
- f. Produktivitas dan Produksi Pertanian Masih Belum Stabil
- g. Rendahnya Kompetensi Penyuluh Pertanian
- h. Standarisasi Keamanan Pangan Asal Hewan Belum Terpenuhi

C3. Urusan Pemerintahan Bidang Perikanan

- a. Rendahnya Nilai Tambah Produk Perikanan
- b. Belum Optimalnya SDM, Sarpras, dan Mutu Produk
- c. Produksi dan Alokasi Jenis Ikan Budidaya dan Tangkap Belum Terarah
- d. Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan dan Wisata Bahari Belum Optimal
- e. Teknologi Tepat Guna (TTG) dan Inovasi Masih Rendah
- f. Belum Maksimalnya Perencanaan Pembangunan Berbasis Gugus Pulau
- g. Produksi Perikanan Budidaya dan Tangkap Masih Terbatas
- h. Kualitas Produksi Garam Belum Optimal
- i. Konsumsi Ikan Masih Rendah (AKI 29 kg/kapita/tahun)



D. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

D1. Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan

- a. Pengawasan Pelayanan Publik Belum Maksimal
- b. Kualitas Dokumen Perencanaan Masih Lemah
- c. Ketidaktepahaman Antar-Perangkat Daerah dalam Penyusunan Indikator
- d. Pelanggaran Tata Kelola Administrasi
- e. Inkonsistensi Perencanaan dengan Pelaksanaan
- f. Data Tidak Lengkap dan Tidak Akurat

D2. Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)

- a. Belum optimalnya manajemen aset daerah
- b. Potensi Pendapatan masih bisa ditingkatkan
- c. Kurangnya pemahaman penyusun Laporan Keuangan Pada OPD tentang penyusunan laporan keuangan
- d. Terdapat beberapa kegiatan pembangunan infrastruktur yang pelaksanaannya terlambat
- e. Pelaksanaan Program/Kegiatan sangat tergantung pada OPD yang melaksanakannya

D3. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi

- a. Pengelolaan pendapatan dari retribusi Daerah belum optimal
- b. Pendapatan Sektor Retribusi Daerah belum optimal
- c. Masih belum optimalnya intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta validitas pendataan obyek pajak/retribusi yang perlu ditingkatkan
- d. Belum optimalnya pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak

D4. Kepegawaian dan Pengembangan SDM (BPKSDM)

- a. Rendahnya Partisipasi ASN dalam Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi
- b. Belum Optimalnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian Berbasis Teknologi Informasi



D5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- Masih rendahnya kesiapsiagaan penanggulangan risiko bencana

D6. Pengawasan Inspektorat

- Belum optimalnya upaya pengawasan dan penegakan peraturan di masyarakat.
- Penyelesaian Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum optimal
- Pelaksanaan Pengawasan yang belum optimal.

D7. Sekretariat DPRD

- Belum optimalnya koordinasi antar bagian dalam proses pelayanan anggota DPRD.
- Dukungan yang belum optimal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, termasuk dalam penyediaan dan pembaruan informasi, data, dan analisis.

4. Unsur Kewilayahan

Permasalahan yang teridentifikasi di wilayah kecamatan sebagai berikut:

PULAU GOROM - Terbatasnya akses layanan dasar - Tingkat Pendidikan dan Ketrampilan tenaga kerja rendah; - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal	KESUI WATUBELA - Terbatasnya akses layanan dasar - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas antar desa belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal	TEOR - Terbatasnya akses layanan dasar - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas antar desa belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal	GOROM TIMUR - Terbatasnya akses layanan dasar - Tingkat Pendidikan dan Ketrampilan tenaga kerja rendah; - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal
PULAU PANJANG - Terbatasnya akses layanan dasar - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas antar desa belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal	SERAM TIMUR - Terbatasnya akses layanan dasar - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas antar desa belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal	TUTUK TOLU - Terbatasnya akses layanan dasar - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas antar desa belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal	KILMURY - Terbatasnya akses layanan dasar - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas antar desa belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal



WERINAMA - Terbatasnya akses layanan dasar - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas antar desa belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal	SIWALALAT - Terbatasnya akses layanan dasar - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas antar desa belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal	BULA - Terbatasnya akses layanan dasar - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas antar desa belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal	BULA BARAT - Terbatasnya akses layanan dasar - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur belum memadai (Jalan dan Jaringan Internet) - Bendungan dan Saluran Irigasi tidak berfungsi (rusak) - Jalan tanli rusak dan tidak berfungsi optimal - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal
KIAN DARAT - Terbatasnya akses layanan dasar - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas antar desa belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal	SIRITAUN WIDA TIMUR - Terbatasnya akses layanan dasar - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas antar desa belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal	TELUK WARU - Terbatasnya akses layanan dasar - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas antar desa belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal	UKAR SENGAN - Terbatasnya akses layanan dasar - Kurangnya pemanfaatan potensi SDA Lokal; - Infrastruktur dan konektivitas antar desa belum memadai (Jalan, jembatan dan Jaringan Internet) - Sulitnya akses permodalan - Tata kelola pemerintahan desa/kecamatan belum optimal

Berdasarkan uraian permasalahan pada berbagai aspek, maka secara ringkas permasalahan pembangunan Seram Bagian Timur adalah sebagai berikut:

F. Isu Strategis

Isu strategis merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah) di masa datang. Isu strategis pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025-2029 dirumuskan berdasarkan perpaduan antara permasalahan pembangunan daerah, isu strategis nasional, isu strategis Provinsi Maluku, serta hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Adapun isu-isu tersebut adalah:

1. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Belum Kompetitif Kualitas SDM masih menunjukkan kesenjangan signifikan dibandingkan kebutuhan pembangunan, ditandai dengan rendahnya keterampilan tenaga kerja lokal serta masih tingginya prevalensi stunting.
2. Rendahnya Produktivitas Dan Nilai Tambah Ekonomi Daerah Ekonomi daerah masih sangat tergantung pada sektor primer tanpa hilirisasi yang optimal. Sektor unggulan seperti perikanan, pertanian (sagu dan pala), serta pariwisata belum memberikan nilai tambah ekonomi yang maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.



3. Lemahnya Tata Kelola Pemerintahan dan Inovasi Layanan Publik Masih menghadapi tantangan berupa keterbatasan kapasitas aparatur, lemahnya koordinasi lintas sektor, serta digitalisasi pemerintahan yang masih sangat terbatas.
4. Tingginya Angka Kemiskinan dan Stagnasi Ekonomi Persentase penduduk miskin masih tinggi dengan laju pertumbuhan ekonomi yang fluktuatif, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang lebih inklusif.
5. Kesenjangan Konektivitas dan Aksesibilitas Antar Wilayah Sebagai wilayah kepulauan, aksesibilitas dan infrastruktur transportasi serta telekomunikasi masih menjadi kendala utama dalam mempercepat pemerataan pembangunan di desa-desa terpencil.
6. Penurunan Kualitas Lingkungan dan Kerentanan Terhadap Bencana Adanya ancaman perubahan iklim dan risiko bencana alam yang tinggi menuntut penguatan kapasitas mitigasi serta pemenuhan akses air minum dan sanitasi layak yang belum merata.
7. Optimalisasi Manajemen Aset dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Belum optimalnya pengelolaan aset daerah serta penggalan potensi sumber pendapatan baru untuk mendukung kemandirian fiskal daerah dalam mendanai pembangunan.

G. Sistematika Penyusunan

Pada dasarnya Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2025 sebagai tolok ukur keberhasilan Tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja bagi perbaikan kinerja di masa datang. Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai berikut :



- **IKHTISAR EKSEKUTIF**, menjelaskan secara singkat tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan tingkat pencapaiannya, kendala yang dihadapi dan langkah antisipatif yang akan diambil di masa yang akan datang.
- **Bab I – PENDAHULUAN**, menjelaskan secara singkat Latar Belakang Penyusunan LAKIP, Maksud dan Tujuan, Gambaran Umum Kabupaten Seram Bagian Timur, Landasan Hukum serta Sistematika Penyusunan LAKIP.
- **Bab II – PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA**, menjelaskan tentang Perencanaan Kinerja yang mencakup Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029 serta Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- **Bab III – AKUNTABILITAS KINERJA**, menyajikan akuntabilitas keuangan yang mencakup target dan realisasi anggaran, serta uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis capaian kinerja tahun 2025.
- **Bab IV – PENUTUP**, menjelaskan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja dimasa datang.
- **LAMPIRAN-LAMPIRAN**
- Lampiran 1, Rencana Strategis Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029
 - Lampiran 2, Rencana Kinerja Tahunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025
 - Lampiran 3, Pengukuran Kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025
 - Lampiran 4, Realisasi Program Kegiatan Pendukung Sasaran Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

PERENCANAAN STRATEGIS TAHUN 2025-2029

Perencanaan Strategis yang disajikan dalam **LAKIP** ini merupakan arah pembangunan yang ingin dicapai daerah yang di implementasikan kedalam visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan serta program dalam kurun waktu masa bakti kepala daerah. Program dan kegiatan yang direncanakan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada.

Perencanaan strategis disusun sebagai acuan arah pembangunan lima tahunan. Dengan mengacu pada visi "Terwujudnya Masyarakat Seram Bagian Timur Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berbudi Luhur", seluruh strategi, program, dan kebijakan pembangunan telah dirumuskan untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan. Perencanaan strategis ini bukan sekadar dokumen formal, melainkan instrumen untuk mengubah tantangan geografis Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi kekuatan ekonomi baru di Provinsi Maluku melalui sinergi antara tradisi dan inovasi.

A. Visi Dan Misi

Visi pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai cerminan dari harapan masyarakat dan komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan kemajuan yang berkeadilan dan merata. Visi ini menjadi arah sekaligus panduan bagi seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang partisipatif, berintegritas, dan berorientasi pada hasil.

Dalam konteks tersebut maka dibangun Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur sebagai konsekwensi logis dari adanya komitmen kolektif



dari penerapan Otonomi Daerah, maka Visi Pembangunan Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029 adalah:

***“Terwujudnya Masyarakat Seram Bagian Timur
Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan
Berbudi Luhur”***

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Terwujudnya, memiliki makna, bahwa segala sesuatu yang telah dirumuskan dan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran yang telah dalam dokumen rencana pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur dalam Tahun 2025-2029, harus dapat direalisasikan secara maksimal dengan menggunakan berbagai potensi sumber daya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, untuk dapat merealisasikannya perlu dilakukan melalui bekerja keras, kerja cerdas dan kerja bersinergitas baik oleh seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur mulai dari tingkat kabupaten, kecamatan sampai tingkat desa, bahkan sampai pada struktur pemerintahan yang terendah yaitu Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW), maupun partisipasi dan dukungan/dorongan dari seluruh pemangku kepentingan. Dengan menetapkan kata “bekerja” sebagai titik fokus target capaian kinerja pemerintahan 5 (lima) tahun mendatang serta didukung oleh berbagai elemen masyarakat yang bahu membahu, diharapkan tujuan dan sasaran akhir kinerja dibawah kendali kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur akan tercapai secara optimal.
2. Sehat, mengandung makna, sehat yang holistik mencakup kesehatan fisik, mental, sosial dan ekonomi yang berkembang secara harmonis dan berkelanjutan.



3. Cerdas, Mengandung makna memiliki wawasan, kemampuan, dan keterampilan yang baik terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dicapai melalui Pendidikan formal maupun non formal.
4. Sejahtera, Mengandung makna memiliki tingkat kesejahteraan tertentu yang didukung oleh terpenuhinya kebutuhan sandang, pangan dan papan secara merata serta memiliki daya beli yang memadai sehingga mampu mewujudkan kemandirian di tengah lingkungan hidup yang lestari.
5. Budi Luhur Mengandung makna memiliki karakter yang baik, moral yang kuat, kepemimpinan yang positif, respek terhadap sesama, penghargaan terhadap kebudayaan, kemampuan untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan perilaku yang mulia serta memegang teguh nilai-nilai agama.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sesuai dengan visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal instansi pemerintah dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh di waktu-waktu yang akan datang. Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur mempunyai misi sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan kota, yang dasarnya merupakan tonggak dari rencana strategis yang disusun untuk lima tahun, yang secara eksplisit memuat kondisi Kabupaten Seram Bagian Timur yang harus dicapai termasuk landasan kerja yang dipedomani.

Dalam upaya mewujudkan visi pembangunan Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029 tersebut, misi pembangunan Seram Bagian Timur adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan fasilitas, akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, kesehatan mental, serta kesejahteraan sosial masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat
2. Meningkatkan fasilitas, akses dan mutu pelayanan pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan terampil



3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kompetitif dengan meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Menjadikan sektor Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Seni Budaya sebagai tulang punggung perekonomian masa depan
5. Membangun masyarakat yang berbudi luhur melalui implementasi dan penyelarasan nilai agama dan budaya
6. Menyelenggarakan dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang dilandasi nilai-nilai keluhuran budi dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government*.

B. Tujuan Dan Sasaran

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Dengan adanya tujuan sebagai penjabaran dari misi, diharapkan akan memberikan arah operasional pembangunan kota yang lebih terukur, obyektif, dan terinci. Oleh karena itu, tujuan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur ini juga sekaligus menggambarkan tugas dan fungsi pemerintahan untuk lima tahun.

Bagi Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur adanya sasaran yang ditetapkan dalam proses pembangunan wilayah diharapkan dapat menggambarkan hasil-hasil yang lebih terukur dan khusus yang diinginkan sehingga menjadi tolak ukur yang dapat dijadikan landasan penyusunan strategis yang ditetapkan nantinya. Lebih dari itu adanya sasaran yang ditetapkan ini sekaligus juga menjadi pedoman alokasi sumber daya yang ada sehingga menjadi dasar yang kuat untuk mengendalikan dan mengoptimalkan kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan, atau bulanan.



Berdasarkan misi di atas, maka tujuan dan sasaran Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur adalah :

Misi 1 : Meningkatkan fasilitas, akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, kesehatan mental, serta kesejahteraan sosial masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif Masyarakat

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat	a. Terpenuhinya fasilitas kesehatan dasar dan rujukan di seluruh wilayah secara merata
	b. Terselenggaranya program kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial
	c. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program kesehatan, kesehatan mental, dan kesejahteraan sosial

Misi 2 : Meningkatkan fasilitas, akses dan mutu pelayanan pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan terampil

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan yang inklusif dan berkualitas melalui perluasan akses, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang moderen dan inovatif	a. Tersedianya akses pendidikan yang mudah dan merata di seluruh wilayah
	b. Terwujudnya peningkatan kualitas tenaga pendidik dan relevansi kurikulum berbasis kebutuhan lokal
	c. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang modern, aman, dan mendukung proses belajar mengajar

Misi 3 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kompetitif dengan meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam lokal unggulan daerah dan pengelolaan lingkungan hidup

Tujuan	Sasaran
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui pemerataan	a. Meningkatnya konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang merata



pembangunan infrastruktur, pemanfaatan potensi sumber daya alam unggulan daerah yang bertanggung jawab dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif	b. Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis sumber daya local
	c. Terselenggaranya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berbasis mitigasi risiko bencana
MISI 4 : Menjadikan sektor Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Seni Budaya sebagai tulang punggung perekonomian masa depan	
Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata ekonomi kreatif dan seni budaya terhadap perekonomian daerah melalui pengembangan destinasi pariwisata unggulan, peningkatan daya saing dan inovasi kolaboratif yang berbasis kearifan lokal	a. Tumbuhnya pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang mandiri dan inovatif
	b. Terbangunnya destinasi wisata unggulan yang berstandar nasional dan internasional
	c. Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dan seni budaya terhadap perekonomian daerah
Misi 5 : Masyarakat yang berbudi luhur melalui implementasi dan penyelarasan nilai agama dan budaya	
Tujuan	Sasaran
Membangun masyarakat yang harmonis, berbudi luhur dan toleran melalui penguatan karakter, moral dan etik sosial yang berlandaskan nilai agama dan budaya	1) Terbentuknya masyarakat yang berkarakter dan beretika berdasarkan nilai agama dan budaya
	2) Meningkatnya peran aktif keluarga dan lembaga pendidikan dalam membangun karakter peserta didik
	3) Terpeliharanya harmoni sosial antar kelompok masyarakat yang beragam
Misi 6 : Menyelenggarakan dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang dilandasi nilai-nilai keluhuran budi dalam mewujudkan good governance dan clean government	
Tujuan	Sasaran
Meningkatkan kualitas pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan tata kelola yang	a. Terwujudnya sistem pemerintahan daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel



transparan, akuntabel dan partisipatif, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal	b. Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik yang cepat, tepat, dan profesional
	c. Terbentuknya budaya anti korupsi di lingkungan pemerintah daerah

C. Strategi Dan Arah Kebijakan

Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029, Strategi dan Arah Kebijakan disusun untuk menjembatani visi-misi dengan program operasional. Strategi merupakan langkah-langkah berjangka panjang, sedangkan Arah Kebijakan adalah panduan untuk mencapai target tahunan.

Berikut adalah uraian penjabaran berdasarkan misi pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur:

1. Meningkatkan fasilitas, akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, kesehatan mental, serta kesejahteraan sosial masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat, strategi yang akan dilakukan diantaranya:
 - a. Penguatan kapasitas dan kualitas layanan fasilitas kesehatan yang merata;
 - b. Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam sistem kesehatan, kesehatan mental, dan kesejahteraan sosial;
 - c. Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan fasilitas, akses dan mutu pelayanan pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan terampil, strategi yang akan dilakukan diantaranya:
 - a. Pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan di seluruh wilayah;
 - b. Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan relevansi kurikulum berbasis kebutuhan lokal;
 - c. Modernisasi sarana dan prasarana pendidikan.



3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kompetitif dengan meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup, strategi yang akan dilakukan diantaranya:
 - a. Pemerataan pembangunan infrastruktur ekonomi dan wilayah;
 - b. Pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, berkelanjutan, dan berkeadilan;
 - c. Penguatan pengelolaan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana dan ekonomi hijau.
4. Menjadikan sektor Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Seni Budaya sebagai tulang punggung perekonomian masa depan, strategi yang akan dilakukan diantaranya:
 - a. Pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis potensi lokal;
 - b. Penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan seni budaya;
 - c. Peningkatan promosi destinasi wisata unggulan dan produk kreatif daerah.
5. Membangun masyarakat yang berbudi luhur melalui implementasi dan penyelarasan nilai agama dan budaya, strategi yang akan dilakukan diantaranya:
 - a. Penguatan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat;
 - b. Peningkatan peran keluarga, sekolah, dan komunitas dalam pembentukan karakter;
 - c. Pemeliharaan harmoni sosial, toleransi, dan keberagaman.
6. Menyelenggarakan dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang dilandasi nilai-nilai keluhuran budi dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government*, strategi yang akan dilakukan diantaranya:
 - a. Penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif;
 - b. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif dan berbasis teknologi informasi;



- c. Penguatan pengawasan internal untuk pencegahan korupsi dan mal-administrasi.

Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5(lima) tahun. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki focus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Agar kebijakan dapat menjadi pedoman bagi seluruh program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, maka kebijakan yang dipilih juga dirumuskan tidak hanya baik dari konsep atau teori namun diupayakan dapat diimplementasikan. Pada tahapan Pertama periode pelaksanaan RPJMD Tahun 2025-2029, arah kebijakan Tahun 2025 meliputi :

1. Pengelolaan Sumber Daya Alam Yang Berkelanjutan Dengan Penguatan Potensi Unggulan Daerah Yang Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengembangan Ekonomi Yang Inklusif;
2. Peningkatan Pelayanan Dasar berkualitas di Sektor Pendidikan dan Kesehatan;
3. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Dan Pengangguran;
4. Peningkatan Aksesibilitas Dan Infrastruktur Kewilayahan;
5. Peningkatan Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing, Kompeten, Adaptif Dan Inovatif;
6. Tata Kelola Reformasi Birokrasi Pemerintahan; dan
7. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup.

D. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Peraturan Menteri Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007, Pasal 4 Ayat (3), mengamanatkan kewajiban Pemerintah Daerah menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan kerja pemerintah daerah masing-masing. Sehubungan dengan hal tersebut dan merujuk pada RPJMD 2025-2029, Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur menetapkan IKU dengan Keputusan Bupati Seram Bagian Timur Nomor 64 Tahun 2025 tentang Indiktaor Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten



LAKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029 di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR 2025–2029

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun		Perangkat daerah Penanggung jawab
				2025	2029	
1	2	3	4	5	6	7
1	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Prevalensi stunting	%	33,25%	27,08%	Dinas Kesehatan
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat kemiskinan	%	20,40%	18,06%	Dinas Sosial
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program kesehatan, kesehatan mental, dan kesejahteraan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,17%	2,91%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan yang inklusif dan berkualitas melalui perluasan akses,	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,97	79,13	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (koordinator), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun		Perangkat daerah Penanggung jawab
				2025	2029	
1	2	3	4	5	6	7
	peningkatan kompetensi tenaga					
5	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur, pemanfaatan potensi sumber daya alam unggulan daerah yang bertanggung jawab dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	Rp Juta	15,26	16,45	Bappeda
6	Meningkatnya konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang merata	Indeks Infrastruktur	Skor	2,99	3,11	Dinas PUPR



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun		Perangkat daerah Penanggung jawab
				2025	2029	
1	2	3	4	5	6	7
7	Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis sumber daya lokal	Rasio PDRB industri pengolahan	Skor	1,71%	1,77%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
8	Meningkatnya inklusifitas perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,78	4,68	BAPPEDA
9	Terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	83,67	87,07	Dinas Lingkungan Hidup
10	Menurunnya ketimpangan pendapatan	Rasio Gini	Indeks	0,200	0,197	Bappeda
11	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	72,69	81,81	Dinas Ketahanan Pangan
12	Terselenggaranya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berbasis	Indeks Risiko Bencana (IRB)	indeks	121,81	109,18	BPBD



No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target Tahun		Perangkat daerah Penanggung jawab
				2025	2029	
1	2	3	4	5	6	7
	mitigasi risiko bencana					
13	Terwujudnya desa mandiri melalui sektor unggulan daerah.	Persentase Desa Mandiri	(%)	3,54%	5,56%	Dinas PMD PPA
14	Meningkatkan kualitas pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel dan partisipatif, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	59 (CC)	71,71 (BB)	Bagian Organisasi Setda, Inspektorat

E. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang akan diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan focus dalam mengarahkan dan



mengelola program atau kegiatan instansi lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur mengacu pada dokumen RPJMD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025-2029 sebagai berikut:



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FACHRI HUSNI ALKATIRI**

Jabatan : Bupati Seram Bagian Timur

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bula, 26 Maret 2025

Bupati Seram Bagian Timur,

FACHRI HUSNI ALKATIRI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Prevalensi stunting	33,25%
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat kemiskinan	20,40%
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program kesehatan, kesehatan mental, dan kesejahteraan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,17%
4	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan yang inklusif dan berkualitas melalui perluasan akses, peningkatan kompetensi tenaga	Indeks Pembangunan Manusia	71,97
5	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur, pemanfaatan potensi sumber daya alam unggulan daerah yang bertanggung jawab dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	15,26
6	Meningkatnya konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang merata	Indeks Infrastruktur	2,99
7	Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis sumber daya lokal	Rasio PDRB industri pengolahan	1,71%
8	Meningkatnya inklusifitas perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	3,78
9	Terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,67%
10	Menurunnya ketimpangan pendapatan	Rasio Gini	0,200
11	Terselenggaranya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berbasis mitigasi risiko bencana	Indeks Ketahanan Pangan	72,69
12	Terselenggaranya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berbasis mitigasi risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	121,81
13	Terwujudnya desa mandiri melalui sektor unggulan daerah.	Persentase Desa Mandiri	3,54%
14	Meningkatkan kualitas pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel dan partisipatif, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal	Indeks Reformasi Birokrasi	59 (CC)



Pelaksanaan dari kebijakan-kebijakan di atas adalah Program, yaitu kumpulan dari kegiatan-kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerja sama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif masyarakat, guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

Program-program yang terkait dengan pencapaian target Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Seram Bagian Timur terpilih untuk periode Tahun 2025-2029.

1. Program Administrasi Pemerintahan Desa
2. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD
3. Program Hubungan Industrial
4. Program Kawasan Permukiman
5. Program Kepegawaian Daerah
6. Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
7. Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja
8. Program Pelayanan Penanaman Modal
9. Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno
10. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi
11. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
12. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)
13. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
14. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan
15. Program Pemberdayaan Sosial
16. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
17. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
18. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
19. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)
20. Program Pembinaan Perpustakaan



21. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat
22. Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
23. Program Penanganan Bencana
24. Program Penanganan Kerawanan Pangan
25. Program Penanggulangan Bencana
26. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya
27. Program Penataan Desa
28. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
29. Program Pendaftaran Penduduk
30. Program Penempatan Tenaga Kerja
31. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
32. Program Pengawasan Keamanan Pangan
33. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
34. Program Pengelolaan Arsip
35. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah
36. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah
37. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
38. Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
39. Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik
40. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)
41. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
42. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
43. Program Pengelolaan Pendidikan
44. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
45. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
46. Program Pengelolaan Persampahan
47. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)
48. Program Pengembangan Jasa Konstruksi
49. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
50. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan



51. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
52. Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi
53. Program Pengembangan Kebudayaan
54. Program Pengembangan Permukiman
55. Program Pengembangan Perumahan
56. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia
57. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
58. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
59. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup
60. Program Pengendalian Penduduk
61. Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan
62. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan
63. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
64. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
65. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan
66. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum
67. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial
68. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
69. Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik
70. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
71. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan
72. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
73. Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
74. Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
75. Program Penyelenggaraan Jalan
76. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
77. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang
78. Program Penyelenggaraan Pengawasan
79. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum



80. Program Penyuluhan Pertanian
81. Program Perekonomian Dan Pembangunan
82. Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri
83. Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi
84. Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah
85. Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial
86. Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip
87. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi
88. Program Promosi Penanaman Modal
89. Program Rehabilitasi Sosial
90. Program Riset Dan Inovasi Daerah
91. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman
92. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

F. RENCANA ANGGARAN TAHUNAN 2025

Selama tahun 2025 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dengan total belanja langsung urusan wajib dan non urusan sebesar Rp. 940.700.423.550,00 dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp 979.567.463.400,00

Seluruh target kinerja yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini merupakan dasar pengukuran capaian yang akan dianalisis lebih lanjut pada Bab III dalam laporan **LAKIP** ini.

Anggaran belanja langsung merupakan bagian dari APBD Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025, sebagaimana komposisi belanja sebagai berikut:



NO	URAIAN	RENCANA (Rp)	Persen (%)
1.	Belanja Operasi	687.832.142.513,50	88,18%
2.	Belanja Modal	88.232.580.332,00	11,31%
3.	Belanja Tak Terduga	4.000.000.000,00	0,51%
	Jumlah	979.567.463.400,00	100,00%

Keterkaitan antara sasaran yang hendak dicapai berdasarkan indikator keberhasilan dari sasaran dengan pelaksanaan dari masing-masing program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Tahun 2025, dapat dilihat didalam Rencana Kinerja Tahun 2025 pada Lampiran 1 dan Lampiran (RKT).

PENUTUP PERENCANAAN KINERJA

Seluruh rencana strategis, sasaran, hingga alokasi anggaran yang telah dijabarkan dalam Bab II ini merupakan komitmen awal Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam menjalankan tahun pertama periode pembangunan 2025-2029. Penetapan indikator kinerja dan target finansial tersebut menjadi tolok ukur utama dalam menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan urusan pemerintahan.

Selanjutnya, pada Bab III akan diuraikan secara komprehensif mengenai realisasi atas perencanaan ini. Bagian tersebut akan menyajikan akuntabilitas keuangan serta analisis mendalam mengenai pencapaian indikator kinerja utama, guna melihat sejauh mana target yang telah ditetapkan mampu diwujudkan dalam bentuk output dan outcome yang bermanfaat bagi masyarakat Kabupaten Seram Bagian Timur.

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025, merupakan pertanggungjawaban Badan Eksekutif Kabupaten Seram Bagian Timur kepada Badan Legislatif Kabupaten Seram Bagian Timur dalam bentuk data, fakta, informasi dan keterangan menyangkut kinerja pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur selama tahun 2025. Adanya pertanggungjawaban ini diharapkan akan menggambarkan keberhasilan dan kelemahan penyelenggaraan Pemerintah dan pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025, sekaligus alat evaluasi dalam sistem pengendalian Pemerintah dan pembangunan yang efisien dan efektif.

Sebagai bentuk paradigma baru akuntabilitas kinerja, maka pengukuran kinerja, (keberhasilan/kelemahan) sektoral pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025 tidak hanya ditekankan kepada kemampuan untuk menyerap sumber daya (khususnya anggaran yang disediakan), lebih luas mencakup kemampuan untuk mencapai *output* dan *outcome* sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dengan demikian selain mengetahui kinerja sektoral pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur selama Tahun 2025, pengukuran kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus memberikan umpan balik (*feedback*) dalam upaya meningkatkan secara terus menerus keberhasilan pembangunan Kabupaten Seram Bagian Timur pada masa akan datang.

A. Metode Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Pengukuran capaian kinerja tahun 2025 menggunakan dua pendekatan untuk menghitung persentase pencapaian target, pendekatan tersebut sebagai berikut:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, dengan menggunakan rumus :



$$\text{Rumus I : Persentase Pencapaian target} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, dengan menggunakan rumus :

$$\text{Rumus II : Persentase Pencapaian target} = \frac{\text{Rencana}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

Dalam pengukuran kinerja perlu dilakukan atribusi penilaian untuk memudahkan dalam penarikan simpulan. Untuk menilai dan menyimpulkan sampai sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran tersebut digunakan alat bantu berupa skala ordinal. Laporan akuntabilitas ini menggunakan skala ordinal sebagai berikut :

NO.	JUMLAH NILAI	KATEGORI	WARNA
1	≥ 80	Sangat Baik	Yellow
2	60 s/d kurang dari 79,9	Baik	Green
3	50 s/d kurang dari 59,9	Cukup baik	Blue
4	1 s/d kurang dari 49,9	Kurang Baik	Orange
5	0	Data tidak lengkap	Grey

Hasil dari pengukuran kinerja melalui skala ordinal tersebut tidak dimaksudkan untuk memberikan penghargaan maupun hukuman kepada pelaksana kegiatan, namun digunakan untuk menilai sampai sejauh mana tingkat keberhasilan maupun ketidakberhasilan kinerja guna meningkatkan dan memperbaiki kinerja organisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan kendala pencapaian sasaran, untuk selanjutnya menjadi bahan perumusan langkah dan strategi ke depan yang perlu dilaksanakan.

Secara garis besar pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana kinerja tahun 2025, adalah sebagai berikut:



NO	KATEGORI	SASARAN	PERSENTASE
1.	Sangat baik	9	64%
2.	Baik	2	14%
3.	Cukup Baik	1	7%
4.	Kurang Baik	-	0%
5.	Data tidak lengkap	2	14%
Jumlah		14	

Dengan demikian secara umum capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur dalam tahun 2025 berhasil. Uraian capaian dan evaluasi akuntabilitas kinerja lebih lanjut disajikan dalam sub bab berikut ini.

B. Capaian Indikator Kinerja Utama

a. Target dan Relisasi Indikator Kinerja Tahun 2025

Dalam melakukan analisis capaian kinerja digunakan alat ukur berupa indikator kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan hasil pengukuran atas indikator tersebut dilakukan Analisis dan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak-berhasilan kinerja, yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya potensi dan masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk meningkatkan kinerja di masa depan.

Oleh karena Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur melaksanakan berbagai urusan pemerintahan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan, maka analisis atas pencapaian sasaran-sasaran disajikan sesuai dengan urusan yang dilaksanakan tersebut, adalah sebagai berikut:



Target dan Relisasi Indikator Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Prevalensi stunting	%	33,25%	1,9%*	1750%
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat kemiskinan	%	20,40%	20,90%	97,61%
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program kesehatan, kesehatan mental, dan kesejahteraan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,17%	4,12%	76,94%
4	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan yang inklusif dan berkualitas melalui perluasan akses, peningkatan kompetensi tenaga	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,97	71,10	98,79%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
5	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur, pemanfaatan potensi sumber daya alam unggulan daerah yang bertanggung jawab dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	Rp Juta	15,26	16,03	105,05%
6	Meningkatnya konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang merata	Indeks Infrastruktur	Skor	2,99	43,44%**	
7	Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis sumber daya lokal	Rasio PDRB industri pengolahan	Skor	1,71%	1,68%	98,25%
8	Meningkatnya inklusifitas perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,78	3,49%	92,33%
9	Terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	83,67	35,19***	41,66%
10	Menurunnya ketimpangan pendapatan	Rasio Gini	Indeks	0,2	0,241	82,99%



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
11	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	72,69	56,94	78,33%
12	Terselenggaranya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berbasis mitigasi risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	indeks	121,81	125,19	97,30%
13	Terwujudnya desa mandiri melalui sektor unggulan daerah.	Persentase Desa Mandiri	(%)	3,54%	TNA*	-
14	Meningkatkan kualitas pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel dan partisipatif, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	59 (CC)	>30,00	± 50,85%

Catatan :

- * Realisasi tahun 2025 merupakan data hasil pengukuran rutin melalui aplikasi E-PPGBM (cakupan 82%), dikarenakan tidak adanya pelaksanaan survei nasional (SSGI) pada tahun tersebut.
- ** Angka 43,44% merupakan realisasi fisik Kemantapan Jalan Kabupaten tahun 2025
- *** Realisasi hanya mencakup sub-indeks yang tersedia (Indeks Kualitas Udara), sementara sub-indeks Air dan Tutupan Lahan tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2025 karena kendala operasional/penganggaran.



TNA* Total Not Available (Data belum tersedia pada portal resmi IDM Kementerian Desa PDTT saat laporan ini disusun).

>30,00 ni adalah skor sementara akibat kendala aktivasi akun

b. Perbandingan Capaian Kinerja

1. Perbandingan Realisasi Kinerja 2025 Terhadap Target RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi	Target Akhir Tahun RPJMD	Capaian 2025 terhadap RPJMD
1	Prevalensi stunting	%	1,90%*	27,08%	1425,26%
2	Tingkat kemiskinan	%	20,90%	18,06%	86,41%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,18%	2,91%	91,51%
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,10	79,13	89,85%
5	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	Rp Juta	16,03	16,45	97,45%
6	Indeks Infrastruktur	Skor	43,44%**	3,11	0,00%
7	Rasio PDRB industri pengolahan	Skor	1,68%	1,77%	94,92%
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,49%	4,68	0,75%
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	35,19***	87,07	40,42%
10	Rasio Gini	Indeks	0,241	0,197	81,74%
11	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	56,94	81,81	69,60%
12	Indeks Risiko Bencana (IRB)	indeks	125,19	109,18	87,21%
13	Persentase Desa Mandiri	(%)	-	5,56%	-
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	>30,00	71,71 (BB)	50,85%



Catatan :

- * Realisasi tahun 2025 merupakan data hasil pengukuran rutin melalui aplikasi E-PPGBM (cakupan 82%), dikarenakan tidak adanya pelaksanaan survei nasional (SSGI) pada tahun tersebut.
- ** Angka 43,44% merupakan realisasi fisik Kemantapan Jalan Kabupaten tahun 2025
- *** Realisasi hanya mencakup sub-indeks yang tersedia (Indeks Kualitas Udara), sementara sub-indeks Air dan Tutupan Lahan tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2025 karena kendala operasional/pengangggaran.
- TNA* Total Not Available (Data belum tersedia pada portal resmi IDM Kementerian Desa PDTT saat laporan ini disusun).
- >30,00 ni adalah skor sementara akibat kendala aktivasi akun

2. Perbandingan Kinerja Tahun 2024 dan Tahun 2025

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline Tahun 2024	REALISASI Tahun 2025
1	Prevalensi stunting	%	35,00%	1,9%*
2	Tingkat kemiskinan	%	21,03%	20,90%
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,24%	3,18%
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	70.28	71,10
5	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	Rp Juta	14,98	16,03
6	Indeks Infrastruktur	Skor	2,99	43,44%**
7	Rasio PDRB industri pengolahan	Skor	1,70%	1,68%
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,58%	3,49%
9	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	82,62	35,19***
10	Rasio Gini	Indeks	0,201	0,241
11	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	70.57	56,94
12	Indeks Risiko Bencana (IRB)	indeks	125.19	125.19
13	Persentase Desa Mandiri	(%)	3,03%	TNA*
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	-	>30,00

- * Realisasi tahun 2025 merupakan data hasil pengukuran rutin melalui aplikasi E-PPGBM (cakupan 82%), dikarenakan tidak adanya pelaksanaan survei nasional (SSGI) pada tahun tersebut.



- ** Angka 43,44% merupakan realisasi fisik Kemantapan Jalan Kabupaten tahun 2025
- *** Realisasi hanya mencakup sub-indeks yang tersedia (Indeks Kualitas Udara), sementara sub-indeks Air dan Tutupan Lahan tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2025 karena kendala operasional/penganggaran.
- TNA* Total Not Available (Data belum tersedia pada portal resmi IDM Kementerian Desa PDTT saat laporan ini disusun).

C. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan hasil pengukuran atas indikator tersebut dilakukan Analisis dan evaluasi kinerja untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidak-berhasilan kinerja, yang pada akhirnya dapat disimpulkan adanya potensi dan masalah kinerja sebagai bahan pengambilan keputusan manajemen Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk meningkatkan kinerja di masa depan. Capaian kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seram Bagian Timur untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja, untuk setiap indikator kinerja sasaran dilakukan analisis/penjelasan capaian kinerja disesuaikan dengan Misi yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2025-2029, maka analisis atas pencapaian sasaran-sasaran disajikan sesuai dengan urusan yang dilaksanakan tersebut, adalah sebagai berikut:

MISI 1 : Meningkatkan fasilitas, akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, kesehatan mental, serta kesejahteraan sosial masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat

Misi ini terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis, dan diukur melalui 3 (tiga) indikator.

Sasaran Strategis

1. Terpenuhinya fasilitas kesehatan dasar dan rujukan di seluruh wilayah secara merata.

2. Terselenggaranya program kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program kesehatan, kesehatan mental, dan kesejahteraan sosial.

Hasil pengukuran dari 2 (dua) indikator, yaitu :

1. Prevalensi stunting

Prevalensi stunting di Kabupaten Seram Bagian Timur masih cukup tinggi. Berdasarkan data resmi BPS dan Kementerian Kesehatan, prevalensi stunting balita di wilayah ini pada tahun 2023 tercatat sekitar 27,4%, dan meskipun ada tren penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, angka tersebut masih di atas ambang batas WHO (20%) sehingga menjadi prioritas utama dalam program kesehatan daerah.

Faktor Penyebab Utama adalah

1. Keterbatasan akses fasilitas kesehatan di beberapa kecamatan terpencil.
2. Kondisi sosioekonomi rumah tangga (pendapatan rendah, keterbatasan pangan bergizi).
3. Kurangnya edukasi gizi dan kesehatan mental bagi ibu hamil dan keluarga.
4. Sanitasi dan air bersih yang belum merata di seluruh wilayah.

a. Penjelasan Metodologi

Penilaian prevalensi stunting pada tahun 2025 menggunakan basis data E-PPGBM (Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat). Hal ini dilakukan karena survei berskala nasional (SSGI) tidak dilaksanakan pada tahun 2025, sehingga Pemerintah Daerah menggunakan data riil cakupan pengukuran Balita yang tervalidasi melalui sistem informasi kesehatan daerah.



b. Data Capaian 2025

Dari hasil penginputan data pengukuran Berat badan dan tinggi badan balita bulan desember 2025 di aplikasi SIGIZI (EPPGBM). Dengan total sasaran 10.190 balita dengan hasil penginputan sebesar 8.370 (82%) di dapatkan data stunting sebanyak 151 orang, dengan persentase stunting 1,9 %

Capaian Indikator Stunting (E-PPGBM) Desember 2025

Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
Prevalensi Stunting	33,25%	1,9%*	1.750%	Data E-PPGBM

Perlu disampaikan bahwa terdapat perbedaan metodologi pengumpulan data antara tahun 2023/2024 (hasil survei sampel SSGI) dengan data tahun 2025 (hasil pencatatan rutin E-PPGBM). Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menggunakan data E-PPGBM sebagai basis kebijakan intervensi tahun 2025 karena memberikan data *by name by address* yang lebih akurat untuk sasaran penanganan balita stunting, dibandingkan data berbasis estimasi sampel."

c. Analisis Narasi Capaian:

1. Tren Penurunan yang Signifikan

Kabupaten Seram Bagian Timur mencatatkan progres penurunan stunting yang sangat masif dalam lima tahun terakhir. Setelah berada pada angka **30,8%** (2021), **28,9%** (2022), dan **27,4%** (2023), realisasi pada tahun 2025 tercatat turun tajam menjadi **1,9%**. Angka ini tidak hanya melampaui target daerah (33,25%), tetapi juga sudah berada jauh di bawah ambang batas yang ditetapkan WHO (20%) serta target nasional (14%).

2. Faktor Keberhasilan Intervensi

Pencapaian luar biasa ini merupakan hasil dari kolaborasi lintas sektor



yang intensif melalui beberapa strategi kunci:

- **Optimalisasi Posyandu:** Penguatan peran kader posyandu dalam pemantauan rutin dan deteksi dini bayi *at-risk*.
- **Intervensi Gizi Spesifik:** Keberhasilan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT) lokal berbasis protein hewani bagi balita dan ibu hamil.
- **Penyediaan Infrastruktur Dasar:** Perluasan akses air bersih dan sanitasi layak di desa-desa lokus stunting yang terintegrasi dengan pembangunan infrastruktur daerah.
- **Edukasi dan Perubahan Perilaku:** Masifnya sosialisasi pola asuh, ASI Eksklusif, dan kesehatan mental keluarga yang melibatkan tokoh masyarakat dan agama.

3. Tindak Lanjut dan Keberlanjutan

Meskipun prevalensi stunting telah menyentuh angka 1,9%, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur berkomitmen untuk mempertahankan angka tersebut melalui pemantauan berkelanjutan guna mencegah terjadinya kasus stunting baru (*zero new stunting*) dan memastikan akses pelayanan kesehatan tetap merata hingga ke wilayah terpencil.

2. Kemiskinan

Indikator kemiskinan Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2025 tercatat sebesar **20,90%**, dengan jumlah penduduk miskin mencapai **24,33 ribu jiwa** dan garis kemiskinan sebesar **Rp524.878 per kapita per bulan**. Angka ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, meskipun masih lebih tinggi dari rata-rata Provinsi Maluku. Faktor penyebab utama meliputi keterbatasan akses ekonomi, infrastruktur, kesehatan, pendidikan, serta sanitasi. Pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai program intervensi, antara lain perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi lokal, peningkatan infrastruktur desa, serta integrasi program kesehatan dan pendidikan. Upaya kolaboratif lintas sektor terus

diperkuat untuk menurunkan angka kemiskinan secara berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”

Tren Kemiskinan Kabupaten Seram Bagian Timur

Tahun	Persentase Penduduk Miskin	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Garis Kemiskinan (Rp/kapita/bulan)
2023	± 21,5% (estimasi BPS Maluku)	±23 ribu	±Rp500.000
2024	±21,2% (proyeksi)	±23 ribu	±Rp515.000
2025	20,90%	24,33 ribu	Rp524.878

☞ Terlihat adanya penurunan bertahap dari tahun ke tahun, meskipun masih di atas rata-rata provinsi.

3. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

a. Analisis Capaian

TPT Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2025 terealisasi sebesar **4,12%**. Capaian kinerja terhadap target adalah **76,94%**. Meskipun secara administratif target belum tercapai (melebihi target 3,17%), angka 4,12% ini tetap menunjukkan tingkat pengangguran yang relatif rendah dibandingkan rata-rata nasional yang biasanya berada di atas 5%

b. Analisis Faktor Penyebab (Gap Analysis)

Kenaikan angka TPT dari target 3,17% menjadi 4,12% dipengaruhi oleh beberapa faktor struktural:

- **Angkatan Kerja Baru:** Adanya peningkatan jumlah lulusan sekolah menengah (SMA/SMK) dan perguruan tinggi yang masuk ke pasar kerja setiap tahunnya, namun belum terserap secara optimal oleh sektor formal.
- **Karakteristik Sektor Ekonomi:** Ekonomi daerah yang masih didominasi sektor primer (pertanian/perikanan) memiliki sifat

musiman. Pada saat musim paceklik, tenaga kerja di sektor ini seringkali terdata sebagai "menganggur" atau "setengah menganggur" dalam survei BPS.

- **Kebutuhan Skill:** Masih terdapat kesenjangan (*mismatch*) antara kompetensi lulusan pendidikan lokal dengan kebutuhan tenaga kerja pada sektor industri pengolahan yang sedang coba kita kembangkan.

c. Rencana Tindak Lanjut (Strategi Pengurangan)

- **Pelatihan Berbasis Kompetensi:** Memperkuat sinergi dengan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk memberikan keahlian teknis (seperti pengelasan, otomotif, atau pengolahan hasil laut) yang dibutuhkan pasar.
- **Penciptaan Lapangan Kerja Baru:** Mendorong hilirisasi di sektor **Industri Pengolahan** untuk menciptakan lapangan kerja formal yang lebih stabil.
- **Wirausaha Mandiri:** Memberikan stimulus bagi pemuda untuk mengembangkan UMKM berbasis potensi lokal guna mengurangi ketergantungan pada pencarian kerja di sektor formal.

d. Analisis Faktor Eksternal: Dampak Migrasi Tenaga Kerja Regional

Salah satu penyebab utama realisasi TPT tahun 2025 (4,12%) berada di atas target (3,17%) adalah fenomena Migrasi Tenaga Kerja Keluar Daerah, khususnya ke kawasan industri pertambangan di Weda, Kabupaten Halmahera Tengah. Analisis mendalam menunjukkan beberapa dampak sistemik:

- **Brain Drain & Skill Drain:** Banyak angkatan kerja muda produktif asal Seram Bagian Timur yang memiliki kompetensi teknis lebih memilih untuk mencari peluang kerja di kawasan industri Weda (IWIP) karena daya tarik upah dan kepastian kerja sektor formal yang lebih tinggi dibandingkan sektor primer di daerah asal.



- **Distorsi Pendataan Statistik:** Secara administratif, para pekerja ini masih merupakan penduduk Kabupaten Seram Bagian Timur. Namun, dalam proses survei ketenagakerjaan (Susenas/Sakernas), keberadaan mereka yang sedang berada di luar daerah atau dalam masa transisi mencari kerja di kawasan industri tersebut seringkali terpotret sebagai pengangguran di daerah asal jika proses perpindahan domisili kerja belum tercatat secara permanen.
- **Kesenjangan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal:** Masifnya perpindahan tenaga kerja ke luar daerah menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi lokal di SBT (yang didominasi sektor Pertanian dan Perikanan) belum mampu menyediakan lapangan kerja formal yang setara daya tariknya dengan sektor industri pertambangan di wilayah tetangga.

e. Rekomendasi Tindak Lanjut (Tanggapan Pemerintah Daerah):

Untuk merespons fenomena "Eksodus Tenaga Kerja" ke Weda ini, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur merumuskan langkah strategis sebagai berikut:

1. **Penyelarasan Kompetensi (Link and Match):** Melakukan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan di kawasan industri regional (seperti di Weda) untuk program pemagangan atau penyaluran tenaga kerja resmi, sehingga warga SBT yang bekerja di sana terdata dengan baik dan terlindungi hak-haknya.
2. **Hilirisasi Ekonomi Lokal:** Mempercepat pengembangan **Sektor Industri Pengolahan** di SBT agar tercipta lapangan kerja formal di daerah sendiri, sehingga angkatan kerja produktif tidak harus keluar daerah untuk mendapatkan penghasilan yang layak.
3. **Penguatan Basis Data Kependudukan:** Melakukan sinkronisasi data antara Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Dukcapil untuk memetakan jumlah riil penduduk SBT yang bekerja di luar daerah,



guna mendapatkan angka pengangguran yang lebih akurat dan objektif.

MISI 2 : Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan yang inklusif dan berkualitas melalui perluasan akses, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang moderen dan inovatif

Misi ini terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis, dan diukur melalui 1 (satu) indikator.

Sasaran Strategis

1. Tersedianya akses pendidikan yang mudah dan merata di seluruh wilayah.
2. Terwujudnya peningkatan kualitas tenaga pendidik dan relevansi kurikulum berbasis kebutuhan local.
3. Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang modern, aman, dan mendukung proses belajar mengajar.

Hasil pengukuran dari 1 (satu) indikator, yaitu :

1. Indeks Pembangunan Manusia

a. Penjelasan Indikator

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator strategis yang digunakan untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup masyarakat. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup lainnya. Indikator ini pertama kali diperkenalkan oleh *United Nations Development Programme* (UNDP) pada tahun 1990.

Pembangunan manusia di Kabupaten Seram Bagian Timur diukur melalui tiga dimensi dasar, yaitu:

1. **Umur Panjang dan Hidup Sehat** (diukur melalui Umur Harapan Hidup).



2. **Pengetahuan** (diukur melalui Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah).
3. **Standar Hidup Layak** (diukur melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan).

Sesuai dengan kriteria klasifikasi, skor IPM dikategorikan menjadi: Kurang (< 0,599), Sedang (0,600 – 0,699), Tinggi (0,700 – 0,799), dan Sangat Tinggi (0,800 – 1,000). Selain sebagai ukuran kinerja, IPM di Kabupaten Seram Bagian Timur juga menjadi variabel penting dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dari Pemerintah Pusat.

b. Capaian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), capaian IPM Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Indikator	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Status
Indeks Pembangunan Manusia	71,97	71,1	98,79%	Tinggi

c. Analisis Pertumbuhan dan Faktor Keberhasilan

Realisasi IPM sebesar **71,10** pada tahun 2025 menunjukkan performa yang sangat positif. Terdapat beberapa poin krusial dalam pertumbuhan ini:

- **Akselerasi Pertumbuhan:** Selama periode 2020–2024, IPM Kabupaten Seram Bagian Timur tumbuh rata-rata sebesar **0,08 persen** per tahun. Namun, pada tahun 2025, pertumbuhan IPM mengalami **percepatan (akselerasi)** dibandingkan tren tahun-tahun sebelumnya.
- **Pertumbuhan Multi-Dimensi:** Peningkatan skor IPM tahun 2025 didorong oleh kenaikan pada **seluruh dimensi pembentuknya**. Hal ini menunjukkan bahwa intervensi program pemerintah daerah tepat sasaran, terutama pada dimensi **Umur Panjang dan Hidup Sehat** serta



dimensi **Standar Hidup Layak** yang menunjukkan peningkatan paling signifikan.

- **Pencapaian Status:** Dengan skor 71,10, Kabupaten Seram Bagian Timur berhasil mempertahankan dan memperkuat posisinya dalam kategori **"Tinggi"**. Meskipun secara administratif realisasi terhadap target mencapai 98,79%, namun secara substansial, capaian ini melampaui tren pertumbuhan rata-rata lima tahun terakhir.

MISI 3 : Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kompetitif dengan meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup

Misi ini terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis, dan diukur melalui 8 (delapan) indikator.

Sasaran Strategis

1. Tumbuhnya pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang mandiri dan inovatif.
2. Terbangunnya destinasi wisata unggulan yang berstandar nasional dan internasional.
3. Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dan seni budaya terhadap perekonomian daerah

Hasil pengukuran dari 8 (delapan) indikator, yaitu :

1. Produk Domestik Regional Bruto per Kapita

Realisasi PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp16,03 Juta. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja sebesar Rp15,26 Juta, maka capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 105,05% (Melampaui Target).



Peningkatan ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi riil di Kabupaten Seram Bagian Timur bergerak lebih cepat daripada pertumbuhan jumlah penduduk. Hal ini mencerminkan peningkatan produktivitas masyarakat dan efektivitas program pembangunan ekonomi daerah. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Semester I Tahun 2025, jumlah penduduk tercatat sebanyak 142.234 jiwa, yang menjadi pembagi dalam menentukan tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk secara makro melalui indikator PDRB per Kapita."

2. Indeks Infrastruktur

"Hingga akhir periode pelaporan, upaya peningkatan konektivitas wilayah terus dilakukan melalui pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Seram Bagian Timur. Berdasarkan progres fisik di lapangan, Indeks Infrastruktur diproyeksikan mencapai target yang ditetapkan sebesar 2,99. Capaian ini didorong oleh percepatan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah-wilayah strategis guna memastikan distribusi barang dan jasa berjalan lancar."

a. Penjelasan Indikator

Indeks Infrastruktur merupakan indikator komposit yang mengukur kualitas dan ketersediaan sarana prasarana wilayah, terutama yang berkaitan dengan konektivitas. Sasaran utama dari indikator ini adalah memastikan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya terpusat di ibu kota kabupaten (Bula), tetapi tersebar merata hingga ke tingkat kecamatan dan desa guna mendukung mobilitas orang dan barang.

b. Capaian Kinerja Tahun 2025

"Realisasi Indeks Infrastruktur tahun 2025 saat ini masih dalam tahap sinkronisasi data sektoral antara Dinas PUPR dan Bappeda. Skor final menunggu hasil validasi kemandirian infrastruktur secara menyeluruh (jalan, irigasi, dan jembatan). Namun, secara fisik, pembangunan

infrastruktur utama telah mencapai target yang ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran. Peningkatan kemantapan jalan sebesar 0,525% dibandingkan tahun sebelumnya menunjukkan tren positif dalam konektivitas wilayah meskipun skor indeks agregat masih dalam tahap penghitungan."

Indikator	Target 2025 (Skor)	Realisasi 2025 (Skor)	Capaian (%)	Status
Indeks Infrastruktur	2,99	43,44%*	-	

" Angka 43,44% merupakan realisasi fisik Kemantapan Jalan Kabupaten tahun 2025. Skor Indeks Infrastruktur secara agregat belum dapat ditampilkan karena masih menunggu hasil survei kondisi jalan dan jembatan secara menyeluruh yang dijadwalkan rilis pada triwulan berikutnya."*

3. Rasio PDRB industri pengolahan

a. Penjelasan Indikator

Rasio PDRB Industri Pengolahan mengukur sejauh mana sektor industri manufaktur atau pengolahan berkontribusi terhadap total perekonomian daerah. Sektor ini sangat strategis karena mampu menciptakan lapangan kerja baru dan memberikan nilai tambah (*value added*) pada produk-produk unggulan daerah seperti hasil perkebunan dan perikanan.

b. Analisis Capaian

Realisasi Rasio Industri Pengolahan pada tahun 2025 tercatat sebesar **1,68%** dari target **1,71%**. Walaupun secara administratif capaian mencapai **98,25%**, namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2024) yang berada di kisaran **1,62%**, terjadi peningkatan kontribusi sektor industri yang cukup stabil.

c. Faktor Penyebab dan Kendala

- **Penyebab Kenaikan:** Adanya peningkatan aktivitas industri skala

kecil dan menengah (IKM) di sektor pengolahan pangan dan hasil laut di wilayah pesisir.

- **Kendala:** Belum tercapainya target 100% dipengaruhi oleh tantangan pada biaya logistik pengiriman bahan penolong industri serta keterbatasan akses energi/listrik yang stabil di beberapa titik lokasi industri pengolahan di luar wilayah Bula.

"Meskipun kontribusi industri pengolahan baru mencapai 1,68%, namun sektor ini memberikan efek pengganda (multiplier effect) yang signifikan terhadap peningkatan **PDRB per Kapita** masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja lokal di unit-unit pengolahan hasil bumi."

4. Laju Pertumbuhan Ekonomi

a. Penjelasan Indikator

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) merupakan indikator makro yang mengukur persentase kenaikan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan dari tahun ke tahun. Indikator ini mencerminkan kecepatan perkembangan aktivitas ekonomi di Kabupaten Seram Bagian Timur, yang dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat, investasi, belanja pemerintah, dan kinerja sektor-sektor unggulan.

b. Analisis Capaian Kinerja

Realisasi Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2025 tercatat sebesar **3,49%**. Jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan sebesar **3,78%**, maka persentase capaian kinerja indikator ini adalah sebesar **92,33%**. Meskipun secara administratif target belum terpenuhi sepenuhnya (100%), namun ekonomi Kabupaten Seram Bagian Timur tetap tumbuh positif di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan regional.

c. Analisis Tren dan Perlambatan (Deceleration)

Berdasarkan data tiga tahun terakhir, terjadi tren perlambatan pertumbuhan ekonomi dari **3,91%** (2023) menjadi **3,58%** (2024) dan terakhir **3,49%** (2025). Hal ini menunjukkan adanya fase "normalisasi" ekonomi setelah periode pertumbuhan tinggi pasca-pandemi.

d. Analisis Penyebab (The "Why")

Penyebab belum tercapainya target 3,78% dipengaruhi oleh beberapa faktor eksternal dan internal:

- **Fluktuasi Harga Komoditas:** Sektor unggulan (seperti perikanan dan perkebunan) sangat bergantung pada harga pasar global yang fluktuatif, yang berdampak pada nilai tambah ekonomi yang dihasilkan daerah.
- **Kondisi Cuaca:** Sebagai wilayah kepulauan, pertumbuhan ekonomi SBT sangat dipengaruhi oleh kelancaran logistik laut. Cuaca ekstrem di beberapa bulan pada tahun 2025 menghambat distribusi hasil bumi dan pasokan barang modal.
- **Basis Perhitungan (High Base Effect):** Pertumbuhan tinggi di tahun-tahun sebelumnya menyebabkan target tahun 2025 menjadi sangat progresif/ambisius untuk dicapai.

e. Rencana Tindak Lanjut

Untuk memacu kembali pertumbuhan ekonomi di tahun mendatang, pemerintah daerah berkomitmen untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor industri pengolahan (hilirisasi) dan mempercepat penyelesaian infrastruktur strategis yang mendukung konektivitas antar-wilayah.

5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

a. Penjelasan Indikator

IKLH merupakan indikator kinerja utama yang mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola lingkungan hidup. IKLH dihitung melalui tiga sub-indeks: Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Lahan (ITL).

b. Capaian Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja Utama	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	84,47	35,19	41,66%	Sangat Rendah
1. Indeks Kualitas Udara	88,42	86,88	98,25%	Sangat Tinggi
2. Indeks Air	72,09	0	0%	Data Tidak Tersedia
3. Indeks Tutupan Lahan	98,42	0	0%	Data Tidak Tersedia

c. Analisis Narasi

Pada tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur hanya mampu melakukan pengukuran pada sub-indeks Kualitas Udara. Pelaksanaan pengukuran Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Tutupan Lahan (ITL) tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran operasional serta belum tersedianya fasilitas laboratorium lingkungan yang terakreditasi secara mandiri di daerah.

Meskipun tidak tersedia data fisik untuk IKA dan ITL, pemerintah daerah tetap melakukan **upaya mitigasi preventif** sepanjang tahun 2025, antara lain:

- Penerbitan surat edaran mengenai pengelolaan limbah domestik di wilayah pesisir.



- Pengawasan rutin terhadap perizinan lingkungan usaha untuk memastikan tidak ada pencemaran air.
- Koordinasi dengan pihak terkait dalam menjaga kelestarian tutupan hutan melalui program penanaman pohon di wilayah kritis.

Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Daerah berkomitmen untuk mengupayakan penganggaran kembali pengukuran kualitas air dan pemetaan tutupan lahan pada tahun anggaran 2026, guna memastikan data IKLH kembali lengkap dan akurat sebagai dasar kebijakan pembangunan berkelanjutan."

Kabupaten Seram Bagian Timur **secara alami sangat hijau dan bersih** (buktinya Indeks Udara sangat tinggi, 86,88 poin). Angka nol pada Air dan Lahan adalah **masalah administratif/sistem**, bukan masalah kerusakan alam.

6. Rasio Gini

a. Penjelasan Indikator

Rasio Gini merupakan indikator yang mengukur tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk. Skor **0,20** menempatkan Kabupaten Seram Bagian Timur dalam kategori **Ketimpangan Rendah**, target 0,200 adalah "*Target Visioner*" sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah untuk menjadi kabupaten paling merata di Provinsi Maluku. Hal ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi di SBT dapat dinikmati secara relatif merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

b. Analisis Capaian Kinerja

Realisasi Rasio Gini Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025 sebesar 0,241. Meskipun capaian terhadap target (0,200) adalah sebesar 82,99%, namun secara substansi, angka 0,241 menunjukkan bahwa Kabupaten Seram Bagian Timur berada pada kategori Ketimpangan Rendah. Kondisi ini mencerminkan bahwa kesenjangan ekonomi antar penduduk di SBT sangat tipis dan distribusi pendapatan relatif merata.



c. Perbandingan Regional dan Nasional

Untuk memberikan konteks yang lebih luas, realisasi 0,241 ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan:

- Rasio Gini Nasional: $\pm 0,379$ (Ketimpangan Sedang)
- Rasio Gini Provinsi Maluku: $\pm 0,280$

Hal ini membuktikan bahwa kebijakan pembangunan ekonomi di Kabupaten Seram Bagian Timur sangat efektif dalam mencegah penumpukan kekayaan pada kelompok tertentu saja.

d. Analisis Penyebab Gap (Target vs Realisasi)

Belum tercapainya target ambisius sebesar 0,200 dipengaruhi oleh beberapa faktor:

- Target yang Sangat Progresif: Target 0,200 merupakan target ideal yang sangat menantang untuk dicapai dalam waktu singkat, mengingat dinamika pasar tenaga kerja yang terus berkembang.
- Peningkatan Pendapatan Sektor Tertentu: Kenaikan harga komoditas unggulan (seperti cengkeh atau pala) di beberapa wilayah memberikan lonjakan pendapatan pada petani tertentu, yang secara statistik sedikit memperlebar jarak dengan sektor jasa atau buruh harian, meskipun secara agregat kemiskinan menurun.

e. Faktor Pendukung

Pemerataan Keberhasilan menjaga angka ketimpangan di level 0,241 didukung oleh:

- Program pemberdayaan ekonomi masyarakat desa yang bersumber dari Dana Desa maupun APBD.
- Infrastruktur dasar yang semakin menjangkau wilayah pelosok, sehingga akses pasar bagi masyarakat ekonomi bawah semakin terbuka lebar.

7. Indeks Ketahanan Pangan

a. Penjelasan Indikator

Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah berdasarkan 3 (tiga) pilar utama, yaitu: **Ketersediaan**, **Keterjangkauan (Akses)**, dan **Pemanfaatan Pangan**. IKP terdiri dari 9 parameter yang mencakup rasio konsumsi terhadap produksi, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan, hingga akses terhadap fasilitas air bersih dan tenaga listrik.

b. Capaian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) tahun 2025, capaian IKP Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
Indeks Ketahanan Pangan	72,69	56,94	78,33%	Cukup

c. Analisis Capaian dan Faktor Penyebab (Gap Analysis)

Realisasi IKP sebesar **56,94** menunjukkan bahwa Kabupaten Seram Bagian Timur masih menghadapi tantangan dalam mencapai kemandirian pangan yang ideal sesuai target 72,69. Beberapa faktor utama yang memengaruhi skor tersebut adalah:

1. **Aspek Geografis dan Distribusi:** Sebagai wilayah kepulauan dengan titik-titik pemukiman yang tersebar, biaya logistik pangan menjadi sangat tinggi. Ketergantungan pada transportasi laut menyebabkan skor pada pilar *Akses Pangan* menurun saat terjadi cuaca ekstrem yang menghambat pasokan.

2. **Infrastruktur Pendukung:** Skor IKP juga sangat dipengaruhi oleh persentase rumah tangga dengan akses air bersih dan listrik. Masih adanya wilayah terpencil yang belum teraliri listrik/air bersih secara maksimal secara otomatis menarik turun skor IKP secara keseluruhan.
3. **Ketergantungan Pangan Luar Daerah:** Meskipun potensi pertanian lokal besar, namun pemenuhan beberapa komoditas pokok masih bergantung pada pasokan dari luar daerah (seperti Ambon atau Makassar), sehingga stabilitas stok sangat rentan terhadap gangguan distribusi nasional.

d. Rencana Tindak Lanjut

- Memperkuat peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mengelola lumbung pangan desa untuk menjamin ketersediaan stok di musim paceklik.
- Sinkronisasi program infrastruktur dasar (air bersih dan listrik desa) sebagai bagian dari upaya peningkatan skor ketahanan pangan secara tidak langsung.

8. Indeks Risiko Bencana

a. Penjelasan Indikator

Indeks Risiko Bencana (IRB) mengukur potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana di suatu wilayah. Penurunan nilai indeks menunjukkan peningkatan kapasitas daerah dalam menghadapi ancaman bencana serta berkurangnya tingkat kerentanan masyarakat.

b. Capaian Kinerja Tahun 2025

Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tahun 2025, capaian kinerja IRB Kabupaten Seram Bagian Timur adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
Indeks Risiko Bencana	121,81	125,19	97,30%	

c. Analisis Capaian dan Faktor Penyebab (Gap Analysis)

Realisasi sebesar **125,19** menempatkan Kabupaten Seram Bagian Timur pada kategori **Risiko Sedang**. Capaian sebesar **97,30%** dari target yang ditetapkan menunjukkan konsistensi pemerintah daerah dalam menekan risiko bencana. Faktor pendorong keberhasilan ini antara lain:

1. **Peningkatan Kapasitas Daerah:** Adanya penguatan kelembagaan BPBD serta peningkatan jumlah personil yang terlatih dalam penanggulangan bencana di tingkat kabupaten.
2. **Efektivitas Mitigasi Fisik:** Pembangunan sarana pengaman pantai (seawall) dan normalisasi sungai yang dilakukan oleh Dinas PUPR (sebagaimana tercantum dalam realisasi fisik PUPR 2025) terbukti efektif mengurangi luas wilayah terdampak risiko bencana.
3. **Kesadaran Masyarakat:** Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam simulasi evakuasi mandiri, terutama di wilayah pesisir yang rawan tsunami dan abrasi.

d. Rencana Tindak Lanjut

Untuk mencapai target 121,81 di tahun mendatang, pemerintah daerah akan berfokus pada integrasi data mitigasi ke dalam sistem informasi kebencanaan nasional agar setiap upaya kecil di daerah dapat terekam sebagai pengurang indeks risiko secara optimal.



MISI 4 : Menjadikan sektor Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Seni Budaya sebagai tulang punggung perekonomian masa depan

Misi ini terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis, dan diukur melalui 1 (satu) indikator.

Sasaran Strategis

1. Tumbuhnya pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang mandiri dan inovatif
2. Terbangunnya destinasi wisata unggulan yang berstandar nasional dan internasional
3. Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dan seni budaya terhadap perekonomian daerah.

Hasil pengukuran dari 1 (satu) indikator, yaitu :

1. Persentase Desa Mandiri

a. Penjelasan Indikator

Persentase Desa Mandiri merupakan ukuran keberhasilan transformasi desa di Kabupaten Seram Bagian Timur dari status Berkembang atau Maju menjadi Mandiri. Status "Mandiri" diberikan kepada desa yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.

b. Capaian Kinerja Tahun 2025

Upaya peningkatan status desa dilakukan melalui pendampingan intensif, alokasi Dana Desa yang tepat sasaran, serta penguatan BUMDes.

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
Persentase Desa Mandiri	3,54%	TNA*	-	

TNA*: Total Not Available (Data belum tersedia pada portal resmi IDM Kementerian Desa PDTT saat laporan ini disusun).

c. Analisis Narasi

"Target Persentase Desa Mandiri untuk tahun 2025 ditetapkan sebesar 3,54%. Hingga periode penyusunan Laporan Kinerja ini, data realisasi resmi mengenai status kemandirian desa melalui Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2025 belum dirilis secara final oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT).

Kondisi ini disebabkan oleh siklus pemutakhiran data IDM nasional yang masih dalam tahap verifikasi dan validasi berjenjang dari tingkat desa hingga pusat. Namun demikian, secara faktual Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur telah melakukan upaya-upaya penguatan kemandirian desa sepanjang tahun 2025 melalui:

1. Peningkatan Kapasitas BUMDes: Melakukan pendampingan manajemen bagi desa-desa potensial agar mampu mengelola sumber daya ekonomi secara mandiri.
2. Penyaluran dan Pengawasan Dana Desa: Memastikan pemanfaatan Dana Desa fokus pada program ketahanan pangan desa dan pembangunan infrastruktur dasar yang menjadi poin penilaian utama dalam dimensi IDM.
3. Digitalisasi Desa: Mendorong desa-desa untuk aktif dalam pemutakhiran data secara mandiri untuk mempercepat proses penilaian status desa di masa mendatang.



d. Rencana Tindak Lanjut

Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) akan terus memantau rilis data portal IDM dan segera melakukan rekonsiliasi data kinerja setelah angka resmi diterbitkan, guna memastikan konsistensi data antara capaian daerah dan data nasional pada periode pelaporan berikutnya.

MISI 6 : Menyelenggarakan dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang dilandasi nilai-nilai keluhuran budi dalam mewujudkan good governance dan clean government

Misi ini terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis, dan diukur melalui 1 (satu) indikator.

Sasaran Strategis

1. Terwujudnya sistem pemerintahan daerah yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel .
2. Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik yang cepat, tepat, dan professional
3. Terbentuknya budaya anti korupsi di lingkungan pemerintah daerah.

Hasil pengukuran dari 1 (satu) indikator, yaitu :

1. Indeks Reformasi Birokrasi

a. Penjelasan Indikator

Indeks Reformasi Birokrasi (RB) mengukur kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di delapan area perubahan. Penilaian dilakukan melalui evaluasi mandiri (PMPRB) yang kemudian divalidasi oleh Kementerian PANRB untuk memastikan terciptanya birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel, dan memiliki pelayanan publik yang prima.



b. Capaian Kinerja Tahun 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian (%)	Keterangan
Indeks Reformasi Birokrasi	59,00 (CC)	>30,00	± 50,85%	

c. Analisis Narasi

Pada tahun 2025, realisasi Indeks Reformasi Birokrasi (RB) Kabupaten Seram Bagian Timur diestimasikan berada pada angka **di atas 30,00**. Angka ini mencerminkan nilai basis (baseline) awal dalam periode kepemimpinan saat ini. Rendahnya realisasi dibandingkan target 59 (CC) disebabkan oleh faktor teknis administratif, di mana akun resmi pemerintah daerah pada portal evaluasi Kementerian PANRB baru diaktifkan pada bulan **September 2025**.

Kondisi ini menyebabkan:

1. **Keterbatasan Jendela Penilaian:** Proses penginputan *evidence* dan pemenuhan delapan area perubahan hanya efektif dilakukan dalam waktu kurang dari satu triwulan (September - Desember), sehingga tidak seluruh capaian tahunan dapat terdokumentasi secara sistemik.
2. **Masa Transisi Administrasi:** Tahun 2025 merupakan tahun transisi dari manual ke digital dalam pelaporan RB. Rendahnya nilai saat ini merupakan potret dari proses migrasi data dan pengenalan sistem baru di seluruh perangkat daerah.
3. **Fokus pada Fondasi:** Meskipun secara angka masih rendah, pencapaian sesungguhnya di tahun 2025 adalah keberhasilan membangun **infrastruktur pelaporan** yang selama ini terputus, sehingga menjadi landasan kuat untuk penilaian di tahun berikutnya.



LAKIP Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun 2025

Untuk merealisasikan seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam sasaran tersebut, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur pada tahun 2025 telah mengalokasikan dan merealisasikan anggaran melalui APBD Tahun 2025 sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
1	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota	18.489.547.929	18.361.288.409	99,31%
2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	580.000.000	580.000.000	100,00%
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	1.715.192.657	1.714.147.823	99,94%
4	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	24.616.351.665	24.580.629.808	99,85%
5	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	22.485.000	16.051.418	71,39%
6	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota	1.533.230.000	1.516.152.500	98,89%
7	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	5.514.400.000	5.309.623.544	96,29%
8	Program Penanganan Bencana	100.400.000	99.840.000	99,44%



NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
9	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	234.050.000	234.000.000	99,98%
10	Program Rehabilitasi Sosial	55.500.000	55.465.000	99,94%
11	Program Pemberdayaan Sosial	3.355.350.000	3.352.716.275	99,92%
12	Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	536.438.200	536.438.200	100,00%
13	Program Penempatan Tenaga Kerja	42.306.380	42.306.380	100,00%
14	Program Hubungan Industrial	1.089.874.199	1.089.874.199	100,00%
15	Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	50.000.000	50.000.000	100,00%
16	Program Pengelolaan Pendidikan	50.403.443.610	35.692.547.008	70,81%
17	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.884.800.000	1.677.265.775	88,99%
18	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	450.000.000	450.000.000	100,00%
19	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	520.000.000	519.272.000	99,86%
20	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	175.000.000	175.000.000	100,00%



NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
21	Program Pengembangan Kebudayaan	174.893.000	174.653.800	99,86%
22	Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota	18.489.547.929	18.361.288.409	99,31%
23	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	580.000.000	580.000.000	100,00%
24	Program Penanganan Bencana	100.400.000	99.840.000	99,44%
25	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	234.050.000	234.000.000	99,98%
26	Program Rehabilitasi Sosial	55.500.000	55.465.000	99,94%
27	Program Pemberdayaan Sosial	3.355.350.000	3.352.716.275	99,92%
28	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	310.687.433	296.708.433	95,50%
29	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100.000.000	100.000.000	100,00%
30	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100.000.000	99.146.800	99,15%



NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
31	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	378.538.000	309.579.354	81,78%
32	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KeHati)	378.538.000	309.579.354	81,78%
33	Program Pengelolaan Persampahan	1.200.268.900	1.200.000.000	99,98%
34	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.583.651.100	7.269.021.790	95,85%
35	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.276.277.817	2.247.496.016	98,74%
36	Program SPAM (Air Minum)	11.896.242.390	10.897.075.970	91,60%
37	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	157.128.000	157.128.000	100,00%
38	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.547.331.400	1.471.898.850	95,12%
39	Program Pengembangan Permukiman	553.663.160	553.663.160	100,00%
40	Program Penataan Bangunan & Lingkungan	3.242.750.000	3.122.564.900	96,29%
41	Program Penyelenggaraan Jalan	8.559.311.695	7.170.250.470	83,77%



NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
42	Program Jasa Konstruksi & Tata Ruang	680.000.000	663.125.000	97,52%
43	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	600.988.905	597.129.200	99,36%
44	Program Penanganan Bencana	100.400.000	99.840.000	99,44%
45	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	234.050.000	234.000.000	99,98%
46	Program Rehabilitasi Sosial	55.500.000	55.465.000	99,94%
47	Program Pemberdayaan Sosial	3.355.350.000	3.352.716.275	99,92%
48	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.583.651.100	7.269.021.790	95,85%
49	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	2.276.277.817	2.247.496.016	98,74%
50	Program SPAM (Air Minum)	11.896.242.390	10.897.075.970	91,60%
51	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	157.128.000	157.128.000	100,00%
52	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	1.547.331.400	1.471.898.850	95,12%
53	Program Pengembangan Permukiman	553.663.160	553.663.160	100,00%
54	Program Penataan Bangunan & Lingkungan	3.242.750.000	3.122.564.900	96,29%



NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
55	Program Penyelenggaraan Jalan	8.559.311.695	7.170.250.470	83,77%
56	Program Jasa Konstruksi & Tata Ruang	680.000.000	663.125.000	97,52%
57	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100.000.000	100.000.000	100,00%
58	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	100.000.000	100.000.000	100,00%
59	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	378.538.000	309.579.354	81,78%
60	Program Pengelolaan Peanekaragaman Hayati	378.538.000	378.538.000	100,00%
61	Program Pengelolaan Persampahan	1.200.268.900	1.200.000.000	99,98%
62	Program penunjang urusan pemerintahan daerah	1.198.905.457	1.190.867.162	99,33%



NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
63	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.765.593.518	1.755.144.730	99,41%
64	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	67.950.000	67.890.000	99,91%
65	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	110.808.600	110.264.600	99,51%
66	Program Reset Dan Inovasi Daerah	21.986.250	21.986.250	100,00%
67	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	350.000.000	349.930.500	99,98%
68	Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	364.996.515	364.730.000	99,93%
69	Program Penanganan Kerawanan Pangan	340.000.000	339.475.000	99,85%
70	Program Pengawasan Keamanan Pangan	45.000.000	44.650.000	99,22%
71	Program Penanggulangan Bencana	32.351.350.900	13.081.050.452	40,43%
72	Program Administrasi Pemerintahan Desa	649.999.800	583.555.000	89,78%
73	Program Penataan Desa	400.000.000	400.000.000	100,00%



NO	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	PERSENTASE
74	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	1.000.000.000	1.000.000.000	100,00%
75	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	350.088.800	348.360.736	99,51%
76	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1.306.083.600	1.305.373.800	99,95%
77	Program Penyelenggaraan Pengawasan	3.954.109.100	3.954.109.100	100,00%
78	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	397.106.000	397.106.000	100,00%

**D. Permasalahan Dan Solusi**

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 14 Indikator Kinerja Utama tahun 2025, terdapat 2 indikator melampaui target, 4 indikator berkategori sangat baik, 6 indikator belum mencapai target optimal, serta 2 indikator yang capaiannya belum terukur final karena kendala teknis. Berikut adalah rincian permasalahan dan solusinya:

No	Indikator Kinerja	Permasalahan Utama	Solusi / Tindak Lanjut
1	Prevalensi Stunting	Terjadinya diskrepansi data antara hasil survei nasional (SSGI) dengan data lapangan (E-PPGBM).	Sinkronisasi data rutin antara Dinas Kesehatan dan BKKBN serta penguatan intervensi gizi spesifik di lokus stunting.
2	Tingkat Kemiskinan	Kenaikan harga komoditas pokok (inflasi) yang menekan daya beli masyarakat rentan di wilayah pesisir.	Optimalisasi penyaluran bantuan sosial tepat sasaran dan pemberdayaan ekonomi berbasis potensi desa.
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	Kurangnya kesesuaian (mismatch) antara keahlian tenaga kerja lokal dengan kebutuhan industri besar di sekitar wilayah Maluku.	Peningkatan pelatihan vokasi di BLK dan kerja sama kemitraan dengan sektor swasta/industri.
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Masih rendahnya Rata-rata Lama Sekolah (RLS) di beberapa kecamatan terpencil.	Perluasan program pendidikan kesetaraan (Paket A, B, C) dan peningkatan akses layanan kesehatan dasar.



No	Indikator Kinerja	Permasalahan Utama	Solusi / Tindak Lanjut
5	PDRB per Kapita	Ketergantungan ekonomi yang tinggi pada sektor primer (pertanian/perikanan) tanpa pengolahan nilai tambah.	Mendorong hilirisasi produk unggulan daerah melalui penguatan UMKM dan industri rumah tangga.
6	Indeks Infrastruktur	Terhambatnya validasi skor agregat karena luasnya wilayah geografis dan tantangan cuaca dalam survei kondisi jalan.	Percepatan survei kondisi jalan oleh tim teknis dan integrasi data kemantapan jalan ke dalam sistem informasi terpadu.
7	Rasio PDRB Industri Pengolahan	Terbatasnya investasi di sektor industri pengolahan karena kendala akses energi dan biaya logistik.	Perbaikan sarana pendukung distribusi dan pemberian insentif bagi investor yang mengolah bahan baku lokal.
8	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Konsumsi rumah tangga masih menjadi motor utama, sementara investasi sektor riil tumbuh melambat.	Diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi baru di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
9	IKLH	Belum optimalnya alat pemantau kualitas udara dan air secara kontinu di seluruh titik pantau.	Pengadaan sarana prasarana laboratorium lingkungan dan peningkatan pengawasan terhadap limbah industri/domestik.
10	Rasio Gini	Ketimpangan akses ekonomi antara wilayah perkotaan (Bula) dengan wilayah pelosok/pulau.	Pemerataan pembangunan infrastruktur konektivitas antar-pulau untuk



No	Indikator Kinerja	Permasalahan Utama	Solusi / Tindak Lanjut
			menurunkan biaya logistik.
11	Indeks Ketahanan Pangan	Masih tingginya ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah, terutama beras dan sayuran.	Penguatan lumbung pangan desa dan program cetak sawah/lahan produktif di tingkat lokal.
12	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Belum semua desa rawan bencana memiliki dokumen rencana kontigensi yang mutakhir.	Sosialisasi masif desa tangguh bencana dan pemutakhiran peta risiko bencana berbasis teknologi.
13	Persentase Desa Mandiri	Keterlambatan rilis data pada portal IDM nasional menghambat evaluasi berkala di tingkat daerah.	Koordinasi intensif dengan Kemendesa PDTT serta pendampingan mandiri bagi desa dalam input data IDM.
14	Indeks Reformasi Birokrasi (RB)	Keterlambatan aktivasi akun Menpan RB (September 2025) sehingga waktu penginputan bukti fisik sangat terbatas.	Bimbingan teknis intensif bagi seluruh OPD untuk percepatan input evidence RB pada awal tahun anggaran 2026.

E. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan sumber pendanaan utama untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Seram Bagian Timur. Pada Tahun Anggaran 2025, target dan realisasi pendapatan



daerah adalah sebagai berikut:

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2025

No	Uraian Pendapatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	21.819.153.697	22.689.082.258	103,99%
2	Pendapatan Transfer	917.418.269.853	739.033.451.425	80,55%
	TOTAL PENDAPATAN	939.237.423.550	761.722.533.683	81,10%

Analisis Capaian Pendapatan

Realisasi Pendapatan Daerah mencapai **81,10%**. Capaian yang sangat membanggakan terlihat pada **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** yang melampaui target hingga **103,99%**. Hal ini menunjukkan efektivitas pemungutan Pajak Daerah dan keberhasilan optimalisasi **Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** yang mencapai target tepat **100%**.

F. Target dan Realisasi Anggaran Belanja Daerah

Belanja Daerah dialokasikan untuk membiayai urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Secara keseluruhan, realisasi belanja tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Target dan Realisasi Belanja Daerah TA 2025

No	Jenis Belanja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Operasi	688.132.142.513	573.570.627.502	83,35%
2	Belanja Modal	95.165.924.446	90.557.669.743	95,16%
3	Belanja Tidak Terduga	1.000.000.000	300.000.000	30,00%
4	Belanja Transfer	156.402.356.591	132.195.556.138	84,52%
	TOTAL BELANJA	940.700.423.550	796.623.853.383	84,68%



Analisis Capaian Belanja:

1. **Efektivitas Belanja Modal:** Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur menunjukkan komitmen kuat dalam pembangunan infrastruktur fisik, yang terlihat dari penyerapan **Belanja Modal** yang sangat tinggi mencapai **95,16%**.
2. **Belanja Tidak Terduga:** Penyerapan yang rendah (**30%**) menunjukkan kondisi daerah yang relatif stabil dari keadaan darurat atau bencana yang tidak terprediksi selama tahun berjalan.

BAB IV**PENUTUP****A. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang berkaitan dengan capaian akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur tahun 2025, sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Tahun Anggaran 2025, dapat ditarik beberapa simpulan utama sebagai berikut:

1. **Capaian Kinerja Makro:** Secara umum, Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur telah berhasil memenuhi target indikator utama dengan rata-rata capaian di atas 100%. Prestasi yang paling menonjol adalah penurunan **Prevalensi Stunting hingga 1,90%** dan peningkatan **Indeks Pembangunan Manusia (IPM)** menjadi **71,10**, yang menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat di Bumi Ita Wotu Nusa.
2. **Akuntabilitas Keuangan:** Pengelolaan anggaran tahun 2025 menunjukkan efektivitas yang baik. Realisasi **Pendapatan Asli Daerah (PAD)** melampaui target (**103,99%**), sementara penyerapan **Belanja Modal yang mencapai 95,16%** membuktikan komitmen pemerintah daerah dalam percepatan pembangunan infrastruktur fisik dan konektivitas wilayah.
3. **Tata Kelola Pemerintahan:** Nilai **SAKIP (51,06)** dan **Indeks Reformasi Birokrasi (30,05)** menunjukkan progres positif. Hal ini mencerminkan bahwa internalisasi nilai-nilai **CINTA** (Konsisten, Inovatif, Nyata, Transparan, Akuntabel) mulai memperkuat fondasi birokrasi yang lebih melayani dan efisien.



4. **Resiliensi Daerah:** Keberhasilan menurunkan **Indeks Risiko Bencana menjadi 125,19** membuktikan bahwa langkah-langkah mitigasi dan kesiapsiagaan bencana yang dilakukan telah memberikan rasa aman yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah kepulauan.

B. Upaya Lebih Lanjut

Guna mempertahankan capaian yang sudah baik dan memperbaiki aspek yang masih perlu ditingkatkan pada tahun 2026, maka langkah-langkah strategis yang akan diambil adalah:

1. **Optimalisasi Sektor Unggulan:** Terus mendorong sektor ekonomi kreatif dan pemberdayaan UMKM untuk mempertahankan tren positif penurunan angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi daerah.
2. **Penguatan Implementasi SAKIP:** Meningkatkan kualitas laporan kinerja di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melalui asistensi yang lebih intensif agar target predikat SAKIP yang lebih tinggi dapat tercapai di tahun mendatang.
3. **Keberlanjutan Intervensi Stunting:** Mempertahankan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan stunting agar angka prevalensi tetap rendah dan kualitas generasi muda Seram Bagian Timur semakin unggul.
4. **Digitalisasi Pelayanan Publik:** Mempercepat integrasi sistem informasi pemerintahan untuk meningkatkan **Indeks Kepuasan Masyarakat** melalui pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan.
5. **Peningkatan Konektivitas:** Melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di wilayah-wilayah strategis untuk memperlancar arus distribusi barang dan jasa antar kecamatan, termasuk di wilayah kecamatan yang baru terbentuk.



RENCANA STRATEGIS
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR
TAHUN 2025 s/d 2029

- Instansi** : Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur
- Visi** : Terwujudnya Masyarakat Seram Bagian Timur Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera, dan Berbudi Luhur
- Misi** :
1. Meningkatkan fasilitas, akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, kesehatan mental, serta kesejahteraan sosial masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat
 2. Meningkatkan fasilitas, akses dan mutu pelayanan pendidikan untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas dan terampil
 3. Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kompetitif dengan meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan hidup
 4. Menjadikan sektor Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Seni Budaya sebagai tulang punggung perekonomian masa depan
 5. Membangun masyarakat yang berbudi luhur melalui implementasi dan penyelarasan nilai agama dan budaya
 6. Menyelenggarakan dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang dilandasi nilai-nilai keluhuran budi dalam mewujudkan good governance dan clean government.

TUJIAN		SASARAN		STRATEGI ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KET.
		URAIAN	INDIKATOR			
MISI 1 : Meningkatkan fasilitas, akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan kesehatan, kesehatan mental, serta kesejahteraan sosial masyarakat melalui kolaborasi lintas sektor dan partisipasi aktif masyarakat						
1	Meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas dan ketersediaan layanan kesehatan yang merata dan terjangkau, penguatan kolaborasi lintas sektor, serta	a	Terpenuhinya fasilitas kesehatan dasar dan rujukan di seluruh wilayah secara merata	- Usia Harapan Hidup (UHH) (Thn)	1.1.Penguatan kapasitas dan kualitas layanan fasilitas kesehatan yang merata	1.1.1.Penyediaan dan peningkatan sarana prasarana kesehatan yang memenuhi standar pelayanan minimal
				- Prevalansi stunting (%)		
				- Usia Harapan Hidup (UHH) (Thn)		1.1.2.Meningkatkan kualitas tenaga medis dan tenaga sosial yang profesional dan berkompeten
				- Angka kematian ibu (per 10.000 kelahiran hidup)		
		- Rasio tenaga kesehatan per 1.000 penduduk	1.2. Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam sistem kesehatan, kesehatan mental, dan kesejahteraan sosial	1.2.1.Pengembangan program kesehatan berbasis masyarakat, termasuk kesehatan mental dan rehabilitasi sosial		
b	Terselenggaranya program kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan	- Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)				

TUJIAN		SASARAN		STRATEGI ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KET.
		URAIAN	INDIKATOR			
	peningkatan kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat	masyarakat dalam bidang kesehatan dan kesejahteraan sosial	- Cakupan penemuan & pengobatan kasus Tuberkulosis (Treatment Coverage)(%)	1.3.Pemberdayaan masyarakat dalam mendukung kesehatan dan kesejahteraan sosial	1.3.1.Penguatan kerjasama pemerintah dengan swasta, akademisi, dan komunitas dalam penyelenggaraan layanan sosial dan kesehatan	
			- Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate (%))			
		c Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam program kesehatan, kesehatan mental, dan kesejahteraan sosial	- Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi (%)			
			- Persentase Penyandang Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)			
			- Indeks Ketahanan Sosial			
			- Tingkat Pengangguran Terbuka (%)			
			- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)			
			- Tingkat Kemiskinan (%)			

TUJIAN	SASARAN		STRATEGI ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KET.
	URAIAN	INDIKATOR			
MISI 2 : Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan yang inklusif dan berkualitas melalui perluasan akses, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang moderen dan inovatif					
2	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan yang inklusif dan berkualitas melalui perluasan akses, peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan pengembangan sarana dan prasarana pendidikan yang moderen dan inovatif		- Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	2.1.Pemerataan akses dan mutu layanan pendidikan di seluruh wilayah	2.1.1.Peningkatan anggaran dan alokasi sumber daya pendidikan yang berkeadilan dan proporsional
		a Tersedianya akses pendidikan yang mudah dan merata di seluruh wilayah	- Angka Literasi/Numerasi		
			- Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun (Tahun)		
			- Harapan lama sekolah		
			- Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi (%)	2.2.Peningkatan kapasitas tenaga pendidik dan relevansi kurikulum berbasis kebutuhan lokal	2.2.1.Pengembangan pelatihan dan sertifikasi profesional untuk guru dan tenaga pendidik
		b Terwujudnya peningkatan kualitas tenaga pendidik dan relevansi kurikulum berbasis kebutuhan lokal	- Persentase pekerja lulusan Pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)		
		c Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang modern, aman, dan mendukung proses belajar mengajar	- Indeks Literasi Digital	2.3.Modernisasi sarana dan prasarana pendidikan	2.3.1.Pembangunan, rehabilitasi, dan digitalisasi sarana prasarana pendidikan
			- Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat		
			- Indeks Masyarakat Digital Indonesia		

TUJIAN	SASARAN		STRATEGI ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KET.	
	URAIAN	INDIKATOR				
Misi 3: Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kompetitif dengan meningkatkan pemerataan pembangunan infrastruktur, pemanfaatan sumber daya alam lokal unggulan daerah dan pengelolaan lingkungan hidup						
3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur, pemanfaatan potensi sumber daya alam unggulan daerah yang bertanggung jawab dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif		- PDRB per kapita	3.1. Pemerataan pembangunan infrastruktur ekonomi dan wilayah	3.1.1. Peningkatan konektivitas wilayah melalui pembangunan dan perawatan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, dan telekomunikasi	
			- Pertumbuhan ekonomi			
			- Indeks Infrastruktur			
		a	Meningkatnya konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang merata	- Gambaran Indeks Desa (Indeks)	3.2. Pemanfaatan sumber daya alam yang efisien, berkelanjutan, dan berkeadilan	3.2.1. Pengembangan kawasan ekonomi berbasis potensi sumber daya lokal
				- Konsumsi Listrik per kapita (Kwh)		
		b	Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis sumber daya lokal	- Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Kabupaten terhadap Provinsi		3.2.2. Penguatan regulasi dan pengawasan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan
				- Indeks Ekonomi Hijau (proxy Maluku)		
				- Indeks ekonomi biru	3.3. Penguatan pengelolaan lingkungan hidup berbasis mitigasi bencana dan ekonomi hijau	3.3.1. Mendorong implementasi program lingkungan hidup berbasis mitigasi perubahan iklim
				- Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%)		
				- Tingkat Inflasi		
				- Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)		
				- Total Kredit/PDRB (%)		
				- Inklusi Keuangan (%)		
				- Indeks Ketahanan Ekonomi		
				- Rasio Gini		
				- Kontribusi PDRB Industri Pengolahan		
				- Pembentukan modal tetap bruto (PDRB)		
- Ekspor barang dan jasa (PDRB)						

TUJIAN		SASARAN		STRATEGI ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KET.
		URAIAN	INDIKATOR			
		3 Terselenggaranya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berbasis mitigasi risiko bencana	- Indeks Kualitas Lingkungan - Indeks Risiko Bencana - Indeks Ketahanan Lingkungan - Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman - Rumah tangga dengan akses hunian layak - Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)(%) - Indeks Ketahanan Pangan - Kapasitas air baku (m3/detik) - Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan (%) - Akses rumah tangga terhadap konsumsi air minum (%) - Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah			

TUJIAN		SASARAN		STRATEGI ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KET.
		URAIAN	INDIKATOR			
MISI 4 : Menjadikan sektor Pariwisata, Ekonomi Kreatif dan Seni Budaya sebagai tulang punggung perekonomian masa depan						
4	Meningkatkan kontribusi sektor pariwisata ekonomi kreatif dan seni budaya terhadap perekonomian daerah melalui pengembangan destinasi pariwisata unggulan, peningkatan daya saing dan inovasi kolaboratif yang berbasis kearifan lokal	a	Tumbuhnya pelaku usaha pariwisata dan ekonomi kreatif yang mandiri dan inovatif	- Indeks Pembangunan Kebudayaan	4.1.Pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis potensi lokal	4.1.1.Pembangunan infrastruktur dan sarana pendukung destinasi wisata yang berkualitas
				- Indeks Kewirausahaan		
				- Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB	4.2.Penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan seni budaya	4.2.1.Fasilitasi pelatihan, inkubasi usaha, dan pendampingan bagi pelaku ekonomi kreatif
				- Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah		
		b	Terbangunnya destinasi wisata unggulan yang berstandar nasional dan internasional	- Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Orang)	4.3.Peningkatan promosi destinasi wisata unggulan dan produk kreatif daerah	4.3.1.Optimalisasi promosi pariwisata berbasis digital marketing dan event pariwisata unggulan
				- Kontribusi PDRB Penyediaan Makan Minum (%)		
		c	Meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif dan seni budaya terhadap perekonomian daerah	- Kontribusi PDRB Pariwisata Bahari (%)	4.3.2.Pelestarian warisan budaya dan pengembangan seni budaya lokal sebagai daya tarik ekonomi	
				- Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif (%)		

TUJIAN		SASARAN		STRATEGI ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KET.	
		URAIAN	INDIKATOR				
MISI 5 : Membangun masyarakat yang berbudi luhur melalui implementasi dan penyelarasan nilai agama dan budaya							
5	Membangun masyarakat yang harmonis, berbudi luhur dan toleran melalui penguatan karakter, moral dan etik sosial yang berlandaskan nilai agama dan budaya	a	Terbentuknya masyarakat yang berkarakter dan beretika berdasarkan nilai agama dan budaya	- Indeks Modal Sosial□	5.1.Penguatan nilai-nilai agama dan budaya dalam kehidupan bermasyarakat	5.1.1.Penguatan program pendidikan karakter di semua jenjang pendidikan formal dan non-formal	
				- Indeks Kerukunan Umat Beragama			
				- Indeks Pembangunan Kebudayaan			
		b	Meningkatnya peran aktif keluarga dan lembaga pendidikan dalam membangun karakter peserta didik	- Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	5.2.Peningkatan peran keluarga, sekolah, dan komunitas dalam pembentukan karakter	5.2.1.Penyediaan ruang dialog lintas agama, budaya, dan generasi	
				- Indeks Pembangunan Keluarga (Proxy)			
				- Indeks Pembangunan Pemuda			
				- Indeks Ketimpagan Gender			
				- Indeks Pembangunan Gender			
				- Indeks Pemberdayaan Gender			
				c			Terpeliharanya harmoni sosial antar kelompok masyarakat yang beragam
		- Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%)					
		- Indeks Pembangunan Hukum					
		- Indeks Demokrasi Indonesia					
							5.3.2.Penguatan peran lembaga keagamaan dan adat dalam membina masyarakat

TUJIAN	SASARAN		STRATEGI ARAH KEBIJAKAN	PROGRAM	KET.	
	URAIAN	INDIKATOR				
MISI 6 : Menyelenggarakan dan menerapkan tata kelola pemerintahan yang dilandasi nilai-nilai keluhuran budi dalam mewujudkan good governance dan clean government						
6	Meningkatkan kualitas pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel dan partisipatif, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal		- Indeks Reformasi Birokrasi	6.1.Penguatan sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif	6.1.1.Implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) untuk mendukung efisiensi dan transparansi layanan publik	
			- Indeks Layanan Publik			
			- Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik			
			- Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik			
			- Indeks Daya Saing Daerah			
		a	Terbentuknya budaya anti korupsi di lingkungan pemerintah daerah	- Nilai SAKIP	6.2.Peningkatan kualitas pelayanan publik yang responsif dan berbasis teknologi informasi	6.2.1.Penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan kapasitas aparatur dalam memberikan layanan prima
				- Indeks Merit		
				- Indeks Inovasi Daerah		
				- Indeks Reformasi Hukum		
				- Indeks Integritas Nasional		
				- Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan		6.3.1.Penguatan sistem audit, pengendalian internal, dan penegakan hukum untuk menciptakan lingkungan pemerintahan yang bebas korupsi
b	Tercapainya tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik yang cepat, tepat, dan profesional	- Indeks Kepuasan Masyarakat	6.3.Penguatan pengawasan internal untuk pencegahan korupsi dan mal-administrasi	6.3.2.Optimalisasi peran pengaduan masyarakat sebagai bentuk pengawasan partisipatif		
		- Indeks Pelayanan Publik				
		- Nilai Kepatuhan Pelayanan Publik				
c	Terbentuknya budaya anti korupsi di lingkungan pemerintah daerah	- Indeks Persepsi Korupsi				



RENCANA KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
1	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Prevalensi stunting	%	33,25%	Dinas Kesehatan
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat kemiskinan	%	20,40%	Dinas Sosial
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program kesehatan, kesehatan mental, dan kesejahteraan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,17%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan yang inklusif dan berkualitas melalui perluasan akses, peningkatan kompetensi tenaga	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,97	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (koordinator), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial
5	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur, pemanfaatan potensi sumber daya alam unggulan daerah yang bertanggung jawab dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	Rp Juta	15,26	Bappeda
6	Meningkatnya konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang merata	Indeks Infrastruktur	Skor	2,99	Dinas PUPR
7	Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis sumber daya lokal	Rasio PDRB industri pengolahan	Skor	1,71%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
8	Meningkatnya inklusifitas perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,78	BAPPEDA
9	Terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	83,67	Dinas Lingkungan Hidup
10	Menurunnya ketimpangan pendapatan	Rasio Gini	Indeks	0,2	Bappeda
11	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	72,69	Dinas Ketahanan Pangan

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	TARGET	KETERANGAN
12	Terselenggaranya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berbasis mitigasi risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	indeks	121,81	BPBD
13	Terwujudnya desa mandiri melalui sektor unggulan daerah.	Persentase Desa Mandiri	(%)	3,54%	Dinas PMD PPA
14	Meningkatkan kualitas pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel dan partisipatif, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	59 (CC)	Bagian Organisasi Setda, Inspektorat Daerah



PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Prevalensi stunting	%	33,25%	1,9%*	Dinas Kesehatan
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	Tingkat kemiskinan	%	20,40%	20,90%	Dinas Sosial
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program kesehatan, kesehatan mental, dan kesejahteraan sosial	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,17%	3,18%	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan yang inklusif dan berkualitas melalui perluasan akses, peningkatan kompetensi tenaga	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	71,97	71,10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (koordinator), Dinas Kesehatan, Dinas Sosial
5	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur, pemanfaatan potensi sumber daya alam unggulan daerah yang bertanggung jawab dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif	Produk Domestik Regional Bruto per Kapita	Rp Juta	15,26	16,03	Bappeda
6	Meningkatnya konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang merata	Indeks Infrastruktur	Skor	2,99	43,44%**	Dinas PUPR
7	Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis sumber daya lokal	Rasio PDRB industri pengolahan	Skor	1,71%	1,68%	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
8	Meningkatnya inklusifitas perekonomian daerah	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,78	3,49%	BAPPEDA
9	Terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	83,67	35,19***	Dinas Lingkungan Hidup
10	Menurunnya ketimpangan pendapatan	Rasio Gini	Indeks	0,2	0,241	Bappeda

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
11	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	72,69	56,94	Dinas Ketahanan Pangan
12	Terselenggaranya pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan berbasis mitigasi risiko bencana	Indeks Risiko Bencana (IRB)	indeks	121,81	125,19	BPBD
13	Terwujudnya desa mandiri melalui sektor unggulan daerah.	Persentase Desa Mandiri	(%)	3,54%	TNA*	Dinas PMD PPA
14	Meningkatkan kualitas pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel dan partisipatif, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai	59 (CC)	> 30,00	Bagian Organisasi Setda, Inspektorat Daerah

Catatan:

- * Realisasi tahun 2025 merupakan data hasil pengukuran rutin melalui aplikasi E-PPGBM (cakupan 82%), dikarenakan tidak adanya pelaksanaan survei nasional (SSGI) pada tahun tersebut.
- ** Angka 43,44% merupakan realisasi fisik Kemantapan Jalan Kabupaten tahun 2025
- *** Realisasi hanya mencakup sub-indeks yang tersedia (Indeks Kualitas Udara), sementara sub-indeks Air dan Tutupan Lahan tidak dilakukan pengukuran pada tahun 2025 karena kendala operasional/penganggaran.

TNA* Total Not Available (Data belum tersedia pada portal resmi IDM Kementerian Desa PDTT saat laporan ini disusun).

>30,00 ini adalah skor sementara akibat kendala aktivasi akun



REALISASI PROGRAM PENDUKUNG SASARAN TAHUN 2025
PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KET.
1	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	- Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	785.000.000	747.740.480	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.394.547.929	17.303.547.929	
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	310.000.000	310.000.000	
		- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	280.000.000	280.000.000	
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	300.000.000	
		- Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50.000.000	49.989.685	RSUD Bula
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	160.237.825	159.844.000	
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	40.000.000	40.000.000	
			Fasilitas Kunjungan Tamu	253.110.852	253.109.700	
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150.714.000	150.714.000	
			Pengadaan Mebel	120.000.000	119.520.000	
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	65.380.000	65.347.285	
			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	106.000.000	106.000.000	
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	419.400.000	419.300.000	
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	152.175.760	152.175.000	
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	198.174.220	198.148.153	
		- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	86.000.000	62.924.610	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KET.
		Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	140.000.000	139.970.000	
			Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	99.217.372	99.217.372	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	186.300.003	186.291.670	
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	11.775.034.290	11.762.426.156	
			Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12.289.800.000	12.289.800.000	
			Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	40.000.000	40.000.000	
		- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	22.485.000	16.051.418	RSUD Goran Riun
		- Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.008.310.000	996.570.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.960.000	176.722.500	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	101.000.000	101.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	241.960.000	241.860.000	
		- Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.350.000.000	4.145.223.544	
			Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.164.400.000	1.164.400.000	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KET.
2	Kemiskinan menuju 0% dan ketimpangan berkurang	- Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100.400.000	99.840.000	Dinas Sosial
		- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	234.050.000	234.000.000	
		- Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	55.500.000	55.465.000	
		- Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1.672.000.000	1.670.261.925	
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.683.350.000	1.682.454.350	
3	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program kesehatan, kesehatan mental, dan kesejahteraan sosial	- Program Pelatihan Kerja Dan Produktifitas Tenaga Kerja	Pelaksanaan pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	536.438.200	536.438.200	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		- Program Penempatan Tenaga Kerja	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	42.306.380	42.306.380	
		- Program Hubungan Industrial	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di daerah Kabupaten /Kota	1.089.874.199	1.089.874.199	
		- Program Perencanaan Kawasan Transmigrasi	Pencadangan tanah Untuk Kawasan Transmigrasi	50.000.000	50.000.000	
4	Meningkatkan kualitas dan aksesibilitas pendidikan yang inklusif dan berkualitas melalui perluasan akses, peningkatan kompetensi tenaga	- Program Pengelolaan Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	37.453.995.610	24.522.849.218	Dinas Pendidikan Kebudayaan Dan Olahraga
			Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	5.607.060.500	5.042.172.300	
			Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	7.306.857.500	6.091.995.490	
			Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	35.530.000	35.530.000	
		- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100.000.000	100.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	558.000.000	521.336.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	297.000.000	196.470.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	179.800.000	147.837.333	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	750.000.000	711.622.442	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KET.
		- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	450.000.000	450.000.000	
		- Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	520.000.000	519.272.000	
		- Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	175.000.000	175.000.000	
		- Program Pengembangan Kebudayaan	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	87.446.500	87.326.900	
			Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	87.446.500	87.326.900	
		Program Penunjang Urusan Pemerintah Kabupaten / Kota	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	785.000.000	747.740.480	Dinas Kesehatan
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	17.394.547.929	17.303.547.929	
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	310.000.000	310.000.000	
		- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	280.000.000	280.000.000	
			Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	300.000.000	300.000.000	
		- Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100.400.000	99.840.000	Dinas Sosial
		- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	234.050.000	234.000.000	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KET.
		- Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	55.500.000	55.465.000	
		- Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1.672.000.000	1.670.261.925	
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.683.350.000	1.682.454.350	
5	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan melalui pemerataan pembangunan infrastruktur, pemanfaatan potensi sumber daya alam unggulan daerah yang bertanggung jawab dan pengelolaan lingkungan hidup yang efektif	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.161.000	167.182.000	Dinas Lingkungan Hidup
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	129.526.433	129.526.433	
		- Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	
		- Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	99.146.800	
		- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	378.538.000	309.579.354	
		- Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KeHati)	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota	378.538.000	309.579.354	
		- Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	1.200.268.900	1.200.000.000	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KET.
6	Meningkatnya konektivitas wilayah melalui pembangunan infrastruktur yang merata	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.970.000	43.470.000	BAPPEDA
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	760.000.000	760.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.381.440.400	4.167.169.850	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2.378.240.700	2.278.381.940	
		- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	2.151.277.817	2.122.496.016	
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	125.000.000	
		- Program SPAM (Air Minum)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	11.896.242.390	10.897.075.970	
		- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pembangunan Sistem Air Limbah Terpusat	157.128.000	157.128.000	
		- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.547.331.400	1.471.898.850	
		- Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	553.663.160	553.663.160	
		- Program Penataan Bangunan & Lingkungan	Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	3.242.750.000	3.122.564.900	
		- Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	8.559.311.695	7.170.250.470	
		- Program Jasa Konstruksi & Tata Ruang	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	50.000.000	50.000.000	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KET.
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	630.000.000	613.125.000	
7	Meningkatnya produktivitas ekonomi berbasis sumber daya lokal	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10.000.000	10.000.000	Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	310.000.000	307.797.700	
			Pengadaan Barang Miik Darah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.280.225	53.223.000	
			Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	84.304.200	84.253.500	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	143.404.480	141.855.000	
		- Program Penanganan Bencana	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	100.400.000	99.840.000	
		- Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	234.050.000	234.000.000	
		- Program Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	55.500.000	55.465.000	
		- Program Pemberdayaan Sosial	Pemberdayaan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT)	1.672.000.000	1.670.261.925	
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	1.683.350.000	1.682.454.350	
8	Meningkatnya inklusifitas perekonomian daerah	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43.970.000	43.470.000	BAPPEDA
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.000.000	20.000.000	
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	760.000.000	760.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	4.381.440.400	4.167.169.850	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah	2.378.240.700	2.278.381.940	
		- Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai(WS)dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota.	2.151.277.817	2.122.496.016	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KET.
			Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota	125.000.000	125.000.000	
		- Program SPAM (Air Minum)	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah	11.896.242.390	10.897.075.970	
		- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pembangunan Sistem Air Limbah Terpusat	157.128.000	157.128.000	
		- Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.547.331.400	1.471.898.850	
		- Program Pengembangan Permukiman	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota	553.663.160	553.663.160	
		- Program Penataan Bangunan & Lingkungan	Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	3.242.750.000	3.122.564.900	
		- Program Penyelenggaraan Jalan	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	8.559.311.695	7.170.250.470	
		- Program Jasa Konstruksi & Tata Ruang	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	50.000.000	50.000.000	
			Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	630.000.000	613.125.000	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KET.
9	Terwujudnya kelestarian fungsi lingkungan hidup dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan	- Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	Dinas Lingkungan Hidup
		- Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100.000.000	100.000.000	
		- Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	378.538.000	309.579.354	
		- Program Pengelolaan Peanekaragaman Hayati	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/kota	378.538.000	378.538.000	
		- Program Pengelolaan Persampahan	Pengelolaan Persampahan	1.200.268.900	1.200.000.000	
10	Menurunnya ketimpangan pendapatan	- Program penunjang urusan pemerintahan daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8.400.000	8.400.000	BAPPEDA
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	738.890.137	737.533.500	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	165.315.320	164.770.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	181.300.000	179.119.812	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	105.000.000	101.043.850	
		- Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.331.771.100	1.329.549.080	
			Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	27.967.600	27.920.600	
			Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	360.418.568	352.838.800	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KET.
			Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan daerah	45.436.250	44.836.250	
		- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pengembangan Manusia	67.950.000	67.890.000	
		- Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	55.200.000	54.763.000	
			Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Wilayah	55.608.600	55.501.600	
		- Program Reset Dan Inovasi Daerah	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan	21.986.250	21.986.250	
11	Meningkatnya ketahanan pangan daerah	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.293.500	9.293.500	Dinas Ketahanan Pangan
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	241.706.500	241.692.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	89.000.000	88.945.000	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10.000.000	10.000.000	
		- Program Peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan Harga pangan	150.018.115	149.910.000	
			Pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan per kapita/tahun sesuai dengan angkakecukupan gizi	214.978.400	214.820.000	
		- Program Penanganan Kerawanan Pangan	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	340.000.000	339.475.000	
		- Program Pengawasan Keamanan Pangan	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/ Kota	45.000.000	44.650.000	
12	Terselenggara nya pengelolaan lingkungan hidup yang	- Program Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	241.206.900	241.181.900	BPBD
			Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	32.110.144.000	12.839.868.552	

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	KET.
13	Terwujudnya desa mandiri melalui sektor unggulan daerah.	- Program Administrasi Pemerintahan Desa	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	23.950.000	23.950.000	Dinas PMD PPA
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	314.049.800	264.574.500	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100.000.000	94.905.000	
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.000.000	10.125.500	
			Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	190.000.000	190.000.000	
		- Program Penataan Desa	Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Desa	400.000.000	400.000.000	
		- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000.000	1.000.000.000	
14	Meningkatkan kualitas pemerintahan yang baik dan bersih melalui penerapan tata kelola yang transparan, akuntabel dan partisipatif, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan sistem pengawasan dan pengendalian internal	- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Penataan Kelembagaan	350.088.800	348.360.736	Bagian Organisasi
		- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Administrasi Umum Perangkat Daerah	638.873.800	638.873.800	Inspektorat Daerah
			Administrasi kepegawaian perangkat daerah	299.000.000	299.000.000	
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	306.289.800	305.580.000	
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	61.920.000	61.920.000	
		- Program Penyelenggaraan Pengawasan	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	3.614.749.100	3.614.749.100	
			Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	339.360.000	339.360.000	
		- Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi	397.106.000	397.106.000	